

No. Reg: 221150000049233

LAPORAN PENELITIAN



MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT (STUDI IMPLEMENTATIF PADA PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN ACEH BESAR)

Ketua Peneliti:

Dr. Safriadi, M.Pd
NIDN: 2005108001
NIPN: 200510800108000

Anggota:

Syafruddin, S.Ag., M.Ag

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Program Studi
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

No. Reg: 221150000049233

LAPORAN PENELITIAN



MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT (STUDI IMPLEMENTATIF PADA PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN ACEH BESAR)

Ketua Peneliti
Dr. Safriadi, M.Pd
NIDN: 2005108001
NIPN: 200510800108000
Anggota:
Syafuruddin, S.Ag., M.Ag

Klaster	Penelitian Dasar Program Studi
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SEPTEMBER 2022

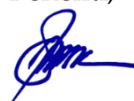
**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2022**

1. a. Judul Penelitian : Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Implementatif pada Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Program Studi
- c. No. Registrasi : 221150000049233
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Safriadi, M.Pd
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP (Kosongkan bagi Non PNS) : 198010052010031001
 - d. NIDN : 2005108001
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200510800108000
 - f. Pangkat/Gol. : Penata
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : FTK/ Manajemen Pendidikan Islam
 - i. Anggota Peneliti
 - Nama Lengkap : Syafruddin, S. Ag., M. Ag
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : FTK/ Pendidikan Agama Islam
3. Lokasi Penelitian : MAS Oemar Diayan dan MAS Al Manar Aceh Besar
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : 2022
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022
8. Output dan outcome Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan
Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry
Banda Aceh,

dto,
Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 17 September 2022
Peneliti,



Dr. Safriadi, M.Pd
NIP. 198010052010031001

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

dto,
Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag.
NIP. 19710908200112101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Dr. Safriadi, M.Pd
NIDN : 2005108001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Besar, 05 Oktober 1980
Alamat : Teubang Phui Masjid Kecamatan Indrapuri Aceh Besar
Fakultas/Prodi : FTK / Manajemen Pendidikan Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Implementatif pada Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar)" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 September 2022
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Safriadi, M.Pd
NIDN. 2005108001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul **“Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Implementatif Pada Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar)”**. Salawat dan salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan kontribusi, motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Bapak Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Bapak Pimpinan pesantren Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar;
7. Bapak Kepala Madrasah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar;
8. Bapak Reviewer yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan laporan penelitian ini;
9. Bapak/Ibu, Saudara/i informan yang telah membantu memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik. Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 17 September 2022
Ketua Peneliti,



Dr. Safriadi, M.Pd

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS
MASYARAKAT (STUDI IMPLEMENTATIF PADA PONDOK
PESANTREN DI KABUPATEN ACEH BESAR)**

Ketua Peneliti:

Dr. Safriadi, M.Pd

Anggota:

Syafruddin, S.Ag., M.Ag,

Abstrak

Membangun mutu madrasah di pondok pesantren merupakan tanggungjawab bersama antara pesantren, pemerintah dan masyarakat. Berbeda dengan sekolah negeri yang banyak menggantungkan sumber pembiayaan dari pemerintah. Kondisi inilah yang mestinya mendorong madrasah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan melalui partisipasi masyarakat. Manajemen pembiayaan madrasah yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas bertujuan mendorong partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi manajemen pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar. Jenis penelitian adalah *field research* dengan prosedur penelitian menggali data dari lapangan kemudian dicermati, dinalisis dan disimpulkan. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi manajemen pembiayaan pendidikan pada madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar, yaitu: (a) Sumber pembiayaan madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar bersumber dari orang tua santri, masyarakat, pemerintah, yayasan, usaha mandiri pesantren, waqaf, zakat, shadaqah dan infaq, (b) Perencanaan pembiayaan Pendidikan pada madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar melibatkan kepala madrasah, dewan guru, pimpinan pesantren, majlis guru, dan komite madrasah, (c) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana, penerimaan dana berasal dari berbagai sumber, diantaranya pemerintah, orang tua santri, yayasan, masyarakat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sedangkan pengeluaran dana digunakan untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari dana yang diterima. Proses *accounting* pada dua madrasah dapat diketahui melalui enam indikator, yaitu: sosialisasi APBM, pelaksanaan APBM sesuai yang direncanakan, buku kontrol dan buku kas, SPJ yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan berita acara laporan keuangan, (d) Pengawasan pembiayaan madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar dilakukan secara internal oleh yayasan, pimpinan pesantren, majlis guru, kepala madrasah dan komite madrasah, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Keywords: *Implementasi, Manajemen Pembiayaan Madrasah, Berbasis Masyarakat.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK PENELITIAN.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI PENELITIAN.....	12
A. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan.....	12
1. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan.....	14
2. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan.....	16
3. Fungsi-Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan...	18
4. Standar Pembiayaan Pendidikan.....	21
B. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
A. Metode Penelitian.....	33
B. Sumber Data dan Informan Penelitian.....	33
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	37
F. Pengecekan dan Uji Keabsahan Data.....	39
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
1. Sumber Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Almanar.....	56
2. Perencanaan Pembiayaan Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar.....	59
3. Pelaksanaan (<i>Budgeting</i>) Pembiayaan Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar.....	62
4. Pengawasan Pembiayaan Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar.....	67

BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA	75
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Identitas Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan.....	44
Tabel 1.2. Struktur Pengurus Pesantren dan MA Oemar Diyan.....	46
Tabel 1.3. Struktur Pengurus Pesantren dan Madrasah Al Manar.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sumber-Sumber Pembiayaan Madrasah.....	57
Gambar 1.2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan RAPBM.....	60
Gambar 1.3. Model Pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan Madrasah.....	67
Gambar 1.4. Model Pengawasan Pembiayaan Pendidikan Madrasah...	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat perjanjian penugasan
2. Surat tugas melaksanakan penelitian dari LP2M
3. Surat Perjalanan Dinas (SPD)
4. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari MA Oemar Diyan
5. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari MA Al Manar
6. Poto-Poto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan yang bermutu merupakan hak fundamental setiap warga negara yang tidak dibatasi oleh status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹ Hal ini sejalan dengan komitmen global melalui UNESCO dalam upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan yang bermutu melalui program "Pendidikan untuk Semua" (*Education for All*).

Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang diakui oleh Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Madrasah bagian yang tak terpisahkan dari SISDIKNAS dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dimana madrasah mempunyai fungsi yang sama dengan satuan pendidikan lainnya terutama dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka keberhasilan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikannya akan memberikan

¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

² Undang- Undang Republik Indonesia, No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. BAB II Pasal 3.

kontribusi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Namun disadari bahwa dalam pelaksanaan upaya tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan, seperti permasalahan yang dihadapi sekolah-sekolah umum lainnya, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh madrasah saat ini adalah mutu pendidikan masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Natsir Armaya Siregar dan Mohd. Sitompul, bahwa meskipun perkembangan madrasah telah cukup menggembirakan akan tetapi dari segi mutu masih belum memuaskan atau kadang-kadang memprihatinkan.³

Untuk meningkatkan mutu madrasah, Departemen Agama mengemas *Development of Madrasah Aliyah Project* (DMAP). Melalui proyek ini diharapkan dapat dilakukan sejumlah langkah strategis dan terobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah aliyah, baik yang menyangkut pengembangan kurikulum, pendanaan, sarana/prasarana, ketenagaan dan pengawasan. DMAP adalah proyek pengembangan madrasah aliyah yang ada di 26 propinsi. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama nomor E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98, tertanggal 20 Februari 1998, tentang pengembangan madrasah aliyah menjadi madrasah aliyah negeri model pada 26 propinsi yang tersebar di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.⁴ Kenyataan menunjukkan bahwa madrasah aliyah yang ada di kabupaten/kota lebih banyak jumlahnya yaitu 7225 madrasah aliyah tidak termasuk dalam proyek pengembangan tersebut. Akibat pengembangan yang dilakukan hanya untuk 26 madrasah aliyah negeri,

³ Natsir Armaya Siregar dan Mohd Saleh Sitompul, *Reposisi dan Revitalisasi Madrasah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003). h. 32.

⁴ Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama nomor E.IV/PP.00.6/KEP/17A/98, tertanggal 20 Februari 1998, tentang pengembangan Madrasah Aliyah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model pada 26 Propinsi.

sehingga mutu madrasah aliyah yang tersebar di kabupaten sangat jauh berbeda dengan mutu madrasah aliyah yang mendapat proyek pengembangan dari DMAP.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah BAB IX Pasal 41 Ayat 1, yaitu pengelolaan madrasah dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis madrasah yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.⁵ Dalam konteks pembiayaan, manajemen berbasis madrasah menuntut kemampuan madrasah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat. Madrasah dapat memberikan laporan secara kontinu sehingga stakeholder dapat mengetahui proses pelaksanaan manajemen pembiayaan di madrasah. Manajemen pembiayaan madrasah yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan stakeholder terhadap kewibawaan dan citra madrasah yang *good government and clean governance*.

Peningkatan mutu madrasah dipengaruhi manajemen pembiayaan madrasah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Manajemen pembiayaan yang baik merupakan salah satu faktor penentu bagi terlaksananya proses pendidikan dan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Manajemen pembiayaan madrasah adalah sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber biaya yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran.⁶ Madrasah memiliki

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 2013, *Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah* BAB IX Pasal 41 Ayat 1

⁶ Jaja Jahari dan Amirullah S, *Manajemen Madrasah, Teori, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hal. 73.

wewenang dan kemandirian dalam mencari sumber biaya, pengalokasian dan pengelolaan secara mandiri sesuai kekhasan yang dimiliki oleh madrasah.

Manajemen berbasis madrasah (*School Based Management*) merupakan model manajemen yang diterapkan saat ini. *School based management* diharapkan menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan kemampuan semua sumber demi tercapainya kemandirian.⁷ Manajemen pembiayaan madrasah berbasis masyarakat merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada madrasah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga madrasah (guru, siswa, kepala madrasah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan dan pengusaha) untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Manajemen pembiayaan madrasah berbasis masyarakat merupakan aspek penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen pendidikan secara keseluruhan. Manajemen pembiayaan madrasah berbasis masyarakat suatu konsep menawarkan otonomi pada madrasah untuk mengelola pembiayaan madrasah yang bersumber dari masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.⁹ Manajemen pembiayaan madrasah berbasis masyarakat yang dikelola secara efektif dan efisien diharapkan dapat mencegah kekeliruan, kebocoran, penyimpangan penggunaan anggaran dari perencanaan dan

⁷ Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012). h 293.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hal. 23.

⁹ Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). hal. 18.

tujuan yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pendidikan pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar juga dipengaruhi manajemen pembiayaan sebagai sarana pendukung dalam kegiatan belajar mengajar yang akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan mutu madrasah di pondok pesantren.

Peningkatan mutu madrasah pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar terlihat dari prestasi yang diraih dalam beberapa tahun terakhir baik tingkat lokal maupun nasional. Pada tahun 2021 sebanyak 15 santri pesantren Chik Oemar Diyan dinyatakan lulus dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) dan pada tahun 2019 enam santri melanjutkan pendidikan di universitas Al Azhar Kairo Mesir.¹⁰ Tiga santri Aceh lulus seleksi Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) tahun 2021, program PBSB diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit PD Pontren) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.¹¹ Pada tahun 2021 tujuh santri Pesantren Chiek Oemar Diyan kembali mendapatkan 7 medali dalam ajang kompetisi sains tingkat nasional POSI.¹² Sebanyak enam santri Madrasah Aliyah Pesantren Modern Al Manar mengikuti Kompetisi Sains Madrasah Online (KSMO) Tingkat Nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.¹³ Meskipun demikian ada juga beberapa pesantren tidak begitu menonjol prestasinya

¹⁰ <https://www.oemardiyan.com/9-santri-dayah-oemar-diyan-indrapuri-lulus-snmptn-ke-usk-6-dapat-undangan-ke-uin-ini-nama-namanya>. diakses tanggal 03 Oktober 2021.

¹¹ <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/03/hebat-tiga-santri-aceh-lulus-seleksi-pbsb-nasional>. diakses tanggal 05 Oktober 2021.

¹² <http://www.oemardiyan.com/ponpes-oemar-diyan-raih-sejumlah-prestasi-dan-mendali-tingkat-nasional-2021/> diakses tanggal 29 Januari 2022.

¹³ <https://almanar.ponpes.id/9-santri-pesantren-al-manar-ikuti-kompetisi-ksmo-nasional>. diakses tanggal 03 Oktober 2021.

sehingga terkesan mutunya masih rendah dan kurang diminati oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran masyarakat dalam pembiayaan madrasah di pondok pesantren. Masyarakat memiliki peran sangat esensial dan salah satu sumber pembiayaan madrasah di pondok pesantren. Sumber pembiayaan berbasis masyarakat sangat potensial dan berlimpah, maka perlu dikelola dengan manajemen yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren. Sumber pembiayaan pendidikan dari masyarakat juga dapat berasal dari zakat, infak, sadakah dan wakaf. Manajemen pengelolaan zakat, infak, sadakah dan wakaf secara efektif dan efisien yang diberikan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan madrasah yang ada di pondok pesantren.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah pokok sebagai bahan penelitian ini yaitu bagaimana implementasi manajemen pembiayaan madrasah berbasis masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar. Sedangkan sub masalahnya adalah:

1. Bagaimana gambaran mengenai sumber pembiayaan madrasah pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana perencanaan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar?
4. Bagaimana pengawasan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis gambaran mengenai sumber pembiayaan madrasah pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar.
- b. Mengetahui dan menganalisis perencanaan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar.
- c. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar.
- d. Mengetahui dan menganalisis pengawasan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis hasil penelitian ini akan menghasilkan kerangka teori dan model manajemen pembiayaan madrasah berbasis masyarakat. Hasil penelitian ini juga sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat di samping itu akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen pendidikan. Sedangkan manfaat praktis dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan, kepala madrasah pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini juga memberi manfaat bagi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan mutu madrasah yang ada di pondok pesantren melalui manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat.

D. Lokasi Penelitian

Banyaknya pondok pesantren yang ada di kabupaten Aceh Besar maka peneliti mengambil tiga pondok pesantren, yaitu: *Pertama*, pesantren Chik Oemar Diyan dengan pertimbangan sebagai pesantren modern tertua di Aceh Besar dan lokasinya jauh dari Kota Banda Aceh. *Kedua*, pesantren Al Manar yang didirikan pada tahun 2001 lokasinya sangat dekat dengan Kota Banda Aceh juga mengalami kemajuan dan prestasi dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Tarmizi dengan judul “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah Pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan dana BOS pada MIN Cempala Kuneng sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaannya sudah transparan dan dimanfaatkan sesuai dengan juknis yang ada, sebelumnya diadakan rapat dengan komite sekolah dan dewan guru. (2) Pembiayaan dana BOS pada MIN Cempala Kuneng berpedoman pada buku panduan BOS yaitu untuk pengadaan buku pokok pelajaran, pelatihan guru, membeli bahan habis pakai, melaksanakan kegiatan kesiswaan, untuk biaya transport, pengadaan bahan laboratorium, dokumentasi, biaya perawatan ringan dan biaya pembuatan dan pengadaan laporan. (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS MIN Cempala Kuneng dilakukan pengawas sekolah dan dinas pendidikan yang merupakan

upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintah meskipun secara tidak langsung namun sangat membantu dalam mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan tindakan pelanggaran hukum. (4). Dana BOS MIN Cempala Kuneng sangat mendukung sekolah untuk membebaskan iuran siswa, mendukung program sekolah dalam melaksanakan kegiatannya baik untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.¹⁴

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Yango, M.D. "*Institutional Mechanism for Promoting Accountability in the Philippines Civil Service*" dalam jurnal *Asian Review of Public Administration*, Vol. III, No. 2. tahun 1991. Yango membagi akuntabilitas menjadi empat macam, yaitu: (1) *Traditional* atau *Regularity Accountability*; (2) *Managerial Accountability*; Akuntabilitas manajerial menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Efisiensi pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan suatu instansi merupakan ciri utama akuntabilitas manajerial. (3) *Program Accountability*; Akuntabilitas program memfokuskan pada pencapaian hasil organisasi pemerintah. (4) *Process Accountability*; Akuntabilitas proses, memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas organisasi.¹⁵

¹⁴ Tarmizi, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah Pada Min Cempala Kuneng Kabupaten Pidie", *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3 No. 4 (2015), tersedia pada <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2595/2449> (2015). diakses tanggal 3 Mei 2021.

¹⁵ M.D Yango, "*Institutional Mechanism for Promoting Accountability in the Philippines Civil Service*", *Jurnal Asian Review of Public Administration*", *Jurnal Asian Review of Public Administration*, Vol. 3 No. 2 (1991). diakses tanggal 3 Mei 2021.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ann E. Tenbrunsel pada tahun 2009 berjudul “*New Ideas for Ethics Research: Thoughts from Accounting, Finance, Management, and Marketing*”. dalam *Journal of Business Ethics*. DOI 10.1007/s10551-008-9902-1. Penelitian tersebut ditemukan bahwa: akuntabilitas adalah faktor penting yang harus menjadi *concern* para pengelola lembaga pendidikan sehingga *stakeholders* dapat mengakses dengan mudah pengelolaan keuangan pada lembaga tersebut. Untuk menciptakan akuntabilitas keuangan perlu dilakukan akuntansi yang efektif, transparan dan kredibel.¹⁶

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Asfila dengan judul: “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembiayaan pendidikan pada MTsN Janarata dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan seluruh personil sekolah. (2) Teknik pengalokasian pembiayaan pendidikan berdasarkan kepada standar yang diprioritaskan untuk meningkatkan mutu pembelajaran (3) Pengawasan pembiayaan dilakukan secara intern dan ekstern, yaitu secara intern dilakukan oleh Kementerian Agama bidang keuangan dan secara ekstren oleh BPKP. (4) Hambatan yang dialami oleh kepala sekolah dalam pembiayaan pendidikan adalah tidak sesuai antara perencanaan dengan penggunaan pembiayaan pendidikan yang dialokasikan pemerintah. Benturan pendapat antara kepala sekolah dengan komponen sekolah tentang penggunaan anggaran madrasah. Implikasi dari penelitian ini adalah terbentuknya gaya manajemen konstruktif yaitu upaya mendorong setiap personil sekolah paham dan memahami tentang pembiayaan,

¹⁶ Ann E. Tenbrunsel, “*New Ideas for Ethics Research: Thoughts from Accounting, Finance, Management, and Marketing*”, *Journal of Business Ethics*, Vol. 2 (2009), <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9902-1>. diakses tanggal 3 Mei 2021.

terciptanya budaya transparansi tentang pengelolaan pembiayaan serta, terciptanya sikap rasa tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan pada MTsN Janarata.¹⁷

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berkaitan manajemen pembiayaan madrasah berbasis masyarakat. Manajemen pembiayaan madrasah berbasis masyarakat merupakan upaya menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kemandirian dan mutu madrasah yang ada di pondok pesantren. Model ini memberikan otonomi lebih besar kepada pesantren dan mendorong partisipasi masyarakat secara langsung melalui manajemen pembiayaan madrasah berbasis masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan secara umum di pondok pesantren.

¹⁷ Asfila, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah", *Jurnal Administrasi Pendidikan Unsyiah*, Vol. 3 No. 4 (2015), tersedia pada <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2598> (2015). diakses tanggal 3 Mei 2021.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Mengacu pada teori *human capital*, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal terpenting dalam melaksanakan pembangunan di setiap Negara. Sumber daya manusia tidak semata-mata dianggap sebagai faktor produksi melainkan penggerak sistem produksi secara menyeluruh. Investasi di bidang sumber daya manusia sangat penting bagi laju pembangunan suatu negara. Investasi tersebut dikonkritkan dengan menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun nonformal. Dalam menghasilkan SDM yang berkualitas maka diperlukan pendidikan yang bermutu, untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, maka diperlukan anggaran atau pembiayaan yang cukup dalam penyelenggaraan pendidikan.¹

Dalam konteks sekolah, biaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah. Analisis efisiensi keuangan sekolah dalam pemanfaatan sumber-sumber keuangan sekolah dan hasil (*output*) sekolah dapat dilakukan dengan cara menganalisis biaya satuan unit (*unit cost*) per siswa. Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada disekolah (*enrollment*) dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa

¹ Safriadi, "Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah", *Intektualita*, Vol. 4 No. 2 (2017), tersedia pada <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/4140/2698> (2017). diakses tanggal 3 Mei 2021.

menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.²

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, maka perlu langkah-langkah dalam memperbaiki manajemen sekolah secara keseluruhan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan lembaga (sekolah).³ Manajemen juga berarti ketrampilan dan kemampuan untuk memperoleh hasil melalui kegiatan bersama dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁴ Jika dikaitkan dengan sekolah, maka manajemen sekolah adalah proses atau kegiatan orang-orang dalam sekolah dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sekolah, sumber keuangan untuk pembiayaan sekolah, dan sarana prasarana yang tersedia untuk tercapainya tujuan penyelenggara pendidikan di sekolah.

Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen yang diterapkan saat ini, dimana manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah. Manajemen berbasis sekolah juga mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha) untuk

² Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Sekolah.*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012). h. 25-26.

³ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). h. 2

⁴ Azhar Arsyad, *Pokok-pokok Manajemen; pengetahuan praktis bagi Pimpinan dan Eksekutif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). h. 4.

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Salah satu aspek yang dikelola oleh sekolah sesuai dengan model ini adalah pengelolaan keuangan dan pembiayaan, karena sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya, sehingga desentralisasi pengalokasian/penggunaan uang untuk pembiayaan kegiatan pendidikan sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Sekolah diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan (*income generating activities*), sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

Manajemen pembiayaan sekolah merupakan aspek penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen sekolah secara keseluruhan, karena pada hakekatnya anggaran dan pembiayaan sekolah merupakan tindakan pengurusan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri atas perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sekolah.

1. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan

a. Biaya Langsung (*direct cost*)

Biaya pendidikan langsung (*direct cost*) merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan keluarga siswa. Biaya langsung, berwujud dalam bentuk pengeluaran uang secara langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan proses belajar mengajar, penelitaian dan pengabdian masyarakat, gaji

⁵ Departemen Pendidikan Nasional R.I. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), hal. 23

guru dan pegawai lainnya, buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan.⁶

Kebanyakan biaya langsung dikeluarkan berasal dari sistem sekolah, dikeluarkan selain untuk menjaga kelancaran dan kualitas belajar juga keperluan administrasi sekolah atau administrasi perkantoran. Keperluan lain yang dikeluarkan seperti: (1) biaya lain tambahan untuk ruang, perlengkapan belajar, alat peraga, bahan laboratorium, pakaian praktek, (2) biaya transportasi/angkutan sekolah, (3) biaya buku pegangan guru dan buku perpustakaan, (4) biaya UKS dan biaya penyelenggaraan kounseling, (5) biaya mendatangkan guru tambahan/nara sumber.⁷

b. Biaya Tidak Langsung (*indirect cost*)

Biaya tidak langsung (*indirect cost*), berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikannya. Misalnya ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan.⁸

Biaya-biaya pendidikan yang dibelanjakan siswa atau orang tua siswa tidak termasuk dalam pengertian biaya pendidikan yang sifatnya nonbudgetair. Pengertian pembiayaan pendidikan yang bersifat budgetair, yaitu biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga. Artinya, biaya-biaya pendidikan yang bersifat

⁶ Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012). h.23.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

budgetair dan *nonbudgetair* termasuk dalam pengertian biaya pendidikan dalam arti yang luas.⁹

Biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya untuk hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan dan biaya kesehatan.¹⁰

2. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.¹¹

Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu:

- 1) Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun

⁹ Nanang Fattah, *Loc.Cit.* h. 23.

¹⁰ Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 227-228.

¹¹ Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). h. 6.

pinjaman pemerintah. Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat atau daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.

- 2) Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti *UNICEF*, *UNESCO*, pajak khusus yang hasil seluruhnya atau sebagian diberikan untuk pendidikan.
- 3) Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.

Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk (a) penempatan guru negeri yang dipekerjakan, (b) bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta (c) uang rutin untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk sumbangan, bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara *incidental* guna menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan dapat diberikan berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup semua pengeluaran rutin sekolah. Jadi pendapatan sekolah selain bersumber dari orang tua siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri dan sumbangan sukarela.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 ditegaskan secara jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh semua pihak, termasuk di dalamnya pemerintah, masyarakat, serta keluarga peserta didik untuk mempermudah dalam memberikan kesempatan belajar bagi semua warga negaranya. Adapun sumber-sumber biaya pendidikan disekolah yaitu: (1)

dana pemerintah, (2) iuran sekolah SPP, (3) sumbangan sukarela dari masyarakat dan perusahaan.¹²

3. Fungsi-Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan

a. Perencanaan Anggaran Pendidikan (*Budgeting*)

Budgeting berfungsi sebagai alat pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana atau penyusunan program dan penganggaran (*planning programming budgeting system*). Perencanaan anggaran merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sarana dan sumber daya yang tersedia.¹³

Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan -kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan, kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.

Untuk menyusun suatu perencanaan pembiayaan atau yang biasa disebut dengan rencana anggaran, hal-hal yang harus diperhatikan adalah

¹² Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, *Loc.Cit.* h. 227.

¹³ Jaja Jahari dan Amirulloh S. *Manajemen Madrasah, Teori, Strategi, dan Implementasi.* (Bandung: Alfabeta. 2013). Hal 47.

(a) mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran (b) mengidentifikasikan sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang (c) semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang (d) memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu (e) menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang (f) melakukan revisi usulan anggaran (g) persetujuan revisi anggaran (h) pengesahan anggaran.

Di tingkat sekolah kita mengenal adanya Rencana Anggaran Pendapatan Sekolah (RAPBS). Penyusunan RAPBS sebaiknya menggunakan analisa SWOT, baik dari segi hukum, tuntutan zaman, keberadaan sekolah (visi dan misi), stakeholder, dan output yang diharapkan. Tujuan penyusunan anggaran ini selain sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya, juga sebagai pembatasan dan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang-uang yang diterima. Dengan adanya RAPBS ini, maka sekolah tidak dapat semauanya memungut sumbangan dari orangtua siswa (BP3) dan sebaliknya BP3 menjadi puas mengetahui arah dan penggunaan dana yang mereka berikan. Sekolah swasta tidak teriakt oleh dana pemerintah terlalu banyak. Karena mereka lebih leluasa menyusun RAPBS-nya. RAPBS disusun dengan melalui proses tertentu, yang besar kecilnya didasarkan atas kebutuhan minimum setiap tahun, dan perkiraan pendapatannya berpedoman pada penerimaan tahun yang lalu.¹⁴

b. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan (*Accuating*)

Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau accounting. Pembukuan

¹⁴ Undang Ruslan W. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021). Hal. 44.

mencakup dua hal yaitu : pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjutnya, yakni menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Jenis pengurusan ke dua disebut juga dengan pengurusan bendaharawan. *Accounting* (pembukuan atau pencatatan) meliputi pencatatan transaksi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah.¹⁵

Accounting kegiatan kedua dari administrasi pembiayaan, yaitu pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan keuangan meliputi dua hal *pertama*, pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan pengurusan bendahara.

c. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan (*Auditing*)

Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan Bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Menurut Nanang Fatah pengawasan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Secara sederhana proses pengawasan terdiri dari (a) memantau atau monitoring (b) menilai (c) melaporkan hasil temuan, baik pada kinerja aktual maupun hasilnya.

Menurut Nanang Fatah, langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

¹⁵ Jaja Jahari dan Amirullah S, *Manajemen Madrasah, Teori, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 78.

1. Penetapan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya maupun waktu.
2. Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.

Pada pola pemerintahan, setiap unit yang ada dalam departemen bertanggung jawabkan pengelolaan uang ini kepada BPK (Badan Pengawasan Keuangan) melalui departemen masing-masing. Sasaran auditing antara lain yaitu kas, yang dimasukkan untuk menguji kebenaran jumlah uang yang ada dengan membandingkan jumlah uang yang seharusnya ada melalui catatannya. Sasaran lain yaitu pengirisan barang, yang bukan saja membandingkan antara jumlah barang yang ada dengan barang yang seharusnya ada, namun juga memeriksa cara-cara penyimpanannya, pemeliharaannya dan penggunaannya. Sasaran dari diadakan auditing antara lain menindak lanjuti jika terjadi penyimpangan, dalam hal ini guna menentukan ganti rugi. Pemeriksaan sebenarnya tidak hanya dilakukan setelah anggaran direalisasikan namun juga sebelumnya (pemeriksaan anggaran pre audit). Pemeriksaan ini meliputi pada kematangan rencana atau anggaran yang menyangkut pada kebijakan semua metode yang digunakan dalam merealisasikan dana.

4. Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar pembiayaan pendidikan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan operasi

satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.¹⁶

Menyusun pembiayaan dalam pendidikan memiliki standar yang harus di pedomani, secara garis besar standar pembiayaan pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
2. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; dan (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.
5. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.¹⁷

Standar pembiayaan pendidikan yang disebutkan diatas terdiri dari dua sisi anggaran biaya, dua sisi anggaran biaya berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan merupakan pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara rutin. Sekolah negeri pada umumnya

¹⁶ Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016). h. 48.

¹⁷ *Ibid.*

memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, anggaran masyarakat (orang tua siswa, dan sumber lainnya). Sedangkan anggaran dasar pengeluaran merupakan jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lainnya.¹⁸

Berdasarkan pendekatan unsur biaya (*ingredient approach*), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan ke dalam beberapa item pengeluaran, yaitu: (1) pengeluaran untuk melaksanakan pembelajaran, (2) pengeluaran untuk tata usaha sekolah, (3) pemeliharaan sarana prasarana sekolah, (4) kesejahteraan pegawai, (5) administrasi, (6) pembinaan teknis tenaga kependidikan, dan (7) pendataan.¹⁹

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Komponen pembiayaan pada suatu sekolah sangat menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan sekolah memerlukan biaya yang cukup dan memadai. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola dengan baik agar biaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Umumnya sekolah selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dan kekurangan biaya. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan solusi yaitu kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan

¹⁸ Nanang Fattah, *Loc.Cit.* h. 23.

¹⁹ *Ibid.* h. 24.

memanfaatkan berbagai sumber biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan otonomi yang diberikan kepada sekolah tidak hanya dalam hal pengelolaan biaya tapi juga memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari biaya dari berbagai sumber dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Kegiatan pembiayaan pendidikan di sekolah menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan keuangan sekolah secara efektif, efisien dan transparan kepada orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah. Manajemen pembiayaan sekolah merupakan pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Manajemen keuangan sekolah merupakan suatu tindakan berkaitan pengurusan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri atas perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah.²⁰

Beberapa kegiatan manajemen keuangan, yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

- a. Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, cara mencapainya, waktu yang dibutuhkan, jumlah orang yang diperlukan, dan besarnya biaya.

²⁰ Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, *Loc.Cit.*

- b. Penggunaan anggaran meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan.
- c. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa, terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan, meliputi berbagai transaksi yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.²¹

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Keuangan dan Pembiayaan, antara lain:

- a. Sekolah/Madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada standar pembiayaan.
- b. Pedoman pengelolaan investasi dan operasional Sekolah/Madrasah mengatur: (1) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola; (2) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional; (3) kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya; (4) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komide sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya.
- c. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah diputuskan oleh komite sekolah/madrasah

²¹ *Ibid.*

serta mendapat persetujuan oleh kepala sekolah/madrasah serta mendapat persetujuan dari institusi di atasnya.

- d. Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah/madrasah disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah/madrasah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.²²

Kedua, accounting (pembukuan atau pencatatan) meliputi pencatatan transaksi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. *Ketiga, auditing* (pemeriksaan atau pengawasan) bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, keputusan, instruksi untuk menilai kewajaran yang diberikan oleh laporan keuangan. Pengawasan harus bersifat mendidik dan dinamis, yaitu menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi, atau meniadakan penyimpangan di samping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan penyempurnaan kondisi objektif pengawasan.

B. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 ditegaskan secara jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh semua pihak, termasuk didalamnya adalah pemerintah, masyarakat, serta keluarga peserta didik untuk mempermudah dalam memberikan kesempatan belajar bagi semua warga negaranya.²³ Dalam konsep pembiayaan pendidikan, sedikitnya ada tiga pertanyaan yang terkait didalamnya, seperti yang dikemukakan

²² [http://www.Slideshare.Net/emriArdi/Permendiknas No. 19 Tahun 2017 Standar Pengelolaan Pendidikan](http://www.Slideshare.Net/emriArdi/PermendiknasNo.19Tahun2017StandarPengelolaanPendidikan). Diakses tanggal 23 Januari 2017.

²³ Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014). h. 227.

oleh Thomas yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana sumbernya, dan untuk apa/siapa dibelanjakan.²⁴

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya memiliki sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial, besar, kaya, melimpah dan berkesinambungan. Sumber yang dimaksud adalah dari zakat, infak, sadakah dan wakaf. Dalam Islam kewajiban setiap muslim untuk membantu antar sesama, termasuk membantu dalam pendidikan, sehingga masyarakat yang selama ini relatif sulit mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan (*equity*), maka dengan adanya zakat, infak, sadakah dan wakaf mereka bisa mendapatkan pendidikan yang bermutu di madrasah.

Pemahaman kita hari ini “seolah-olah” zakat, infak, sadakah, dan wakaf hanya diperuntukkan bagi mustahiknya dan jarang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Kondisi demikian yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan pendidikan pada madrasah seakan kecil. Apabila sumber biaya ini dapat dimanej dan dikelola dengan baik akan menjadi sumber biaya pendidikan yang melimpah di madrasah.

1. Zakat

Dalam konteks sosial, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk tolong menolong antar sesama, sebagai bukti kasih sayang sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah dan terhimpit oleh kemiskinan dan kebodohan.²⁵ Dalam bidang sosial, dengan zakat orang fakir, miskin dapat berperan dalam kehidupannya. Dengan zakat pula orang miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-sikan atau diremehkan, karena mereka dibantu dan dihargai.

²⁴ Nanang Fattah. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). cet. ke-2, hal. 1.

²⁵ Rozalinda. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*. (Jakarta: RajaGrafindo. 2016). h. 248.

Potensi zakat di Indonesia sebetulnya sangat besar. Dalam perhitungan kasar, berdasarkan jumlah penduduk Muslim Indonesia 166 juta jiwa (83% dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 204,8 juta jiwa), diasumsikan yang berkedudukan sebagai muzakki adalah 18%, potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 triliun per tahun.²⁶ Angka sebesar 19,3 triliun tersebut apabila dipakai untuk pembangunan seluruh madrasah yang ada di Indonesia, maka persoalan kekurangan sumber biaya di madrasah akan teratasi. Sumber yang potensial tersebut apabila mampu direalisasikan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan madrasah di seluruh Indonesia.

2. Infak

Infak adalah segala bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain.²⁷ Oleh karena itu, infak memiliki peluang yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Namun begitu, perlu pengaturan dalam hal waktu, frekuensi, distribusi dan pengelolanya. Pengelola infak bisa pemerintah, masyarakat terbatas (*community*) dan lembaga pendidikan. Jika lembaga pendidikan (madrasah) sebagai pengelolanya, maka penarikan dan pendistribusiannya bisa difokuskan untuk mencapai target mutu tertentu (biaya investasi dan operasional).

3. Sadakah

Menurut terminologi syariat, sadakah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Orang yang bersadakah pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali nilainya dari harta yang

²⁶ Ibid, h. 265

²⁷ Gus Arifin. *Dalil-Dalil Zakat, Infak dan Sedekah*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2011). h. 173.

disedakahkan, bahkan melebihi dari itu.²⁸ Dalam hal ini sadakah bisa menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang bisa dialokasikan untuk biaya pribadi peserta didik khususnya yang miskin.

4. Wakaf

Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum merupakan hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk pembangunan dan merawat tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, pemberdayaan para ulama dan da'i.²⁹

Wakaf dalam penggunaannya juga bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi sebagai sumber produktif, sehingga harta wakaf bisa dimanfaatkan "secara terus-menerus" untuk kepentingan umum. Pemberdayaan harta wakaf (termasuk wakaf tunai) yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat, wali siswa, dan pihak sekolah, maka hasilnya bisa digunakan untuk sumber pembiayaan pendidikan di sekolah yang sangat potensial baik untuk biaya investasi, operasional maupun pribadi.

C. Fungsi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Membangun mutu madrasah diperlukan pembiayaan pendidikan yang tidak sedikit. Karena biaya pendidikan akan menentukan terbentuknya kualitas *input, process, output* bahkan *outcomes* pendidikan. Pada gilirannya manajemen pembiayaan yang transparan dan akuntabel "mutlak" diperlukan bagi proses pembangunan madrasah yang bermutu.

²⁸ Jaja Jaharja dan Amirullah S. *Manajemen Madrasah*, (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 84.

²⁹ Jaja Jaharja dan Amirullah S. *Manajemen Madrasah*, (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 83).

Pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan secara garis besar mencakup tiga fungsi utama, yaitu perencanaan anggaran (*budgeting*), pelaksanaan anggaran (*accounting*) dan pemeriksaan atau pengawasan anggaran (*auditing*).³⁰ Perencanaan anggaran mencakup pengaturan secara koordinatif terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sedangkan pelaksanaan anggaran merupakan tindakan lanjut dari rencana yang dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaporan atau pengawasan merupakan tahap penentuan bahwa sasaran yang telah direncanakan benar-benar telah tercapai.

Manajemen pembiayaan pendidikan yang transparan dan akuntabel menjadi penentu keberhasilan pembangunan madrasah bermutu. Fungsi-fungsi manajemen pembiayaan pendidikan berupa *budgeting*, *accounting* dan *auditing* yang dilaksanakan madrasah harus mampu menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu yang menjadi fokus manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat, adalah adanya akuntabilitas pada setiap fungsi manajemennya; akuntabilitas penyusunan rencana anggaran (*budgeting*), akuntabilitas pelaksanaan anggaran (*accounting*), dan akuntabilitas pelaporan anggaran (*auditing*).

Akuntabilitas merupakan strategi madrasah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Contoh dalam konteks akuntabilitas *budgeting* bisa dilihat dari enam faktor: a) penyusunan RAPBM dilakukan oleh tim, b) rapat tim dihadiri oleh semua unsur, c) penyusunan RAPBM didasarkan atas analisis kebutuhan, d) penentuan skala prioritas yang berorientasi pada mutu, e)

³⁰ Yeti Heryati dan Mumuh Muhsin, *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014. h. 235).

sumber dana yang variatif dan f) alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan.³¹

Madrasah yang mampu menerapkan akuntabilitas baik akan memudahkan madrasah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang variatif dan melimpah, seperti sumber pembiayaan dari pengelolaan zakat, infak, sadakah dan wakaf. Potensi-potensi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan, sehingga akuntabilitas yang harus dimiliki pihak pengelola madrasah tidak sebatas internal dan eksternal tetapi juga akuntabilitas akhirat.

Accounting pada dasarnya adalah akuntabilitas pengeluaran keuangan untuk kepentingan proses pendidikan. Fahrurrazi kembali menyatakan bahwa ada enam indikator apakah madrasah cukup akuntabel dalam melaksanakan prosedur pengeluaran biaya pendidikan, yaitu a) APBM disosialisasikan kepada warga madrasah, b) pelaksanaan APBM sesuai dengan yang direncanakan, c) ada buku kontrol pemasukan, d) ada buku kas/pembukuan keuangan, e) SPJ dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan f) ada berita acara pemeriksaan administrasi keuangan.³²

ketiga adalah *Auditing* atau evaluasi bisa dikatakan akuntabel jika memenuhi kriteria: (1) pengelolaan keuangan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti yayasan, pemerintah, guru, komite dan wali siswa secara periodik, (2) pertanggungjawaban keuangan sekolah dilaporkan secara terbuka dalam rapat pleno komite.³³

Jika madrasah mampu melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan secara akuntabel, maka berarti madrasah menjadi lembaga

³¹ Fahrurrazi. *Manajemen Keuangan Madrasah*. (Media Pendidikan, Jurnal Pendidikan Islam. Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunna Gunung Djati Bandung bekerjasama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia. 2012) h.232.

³² Ibid

³³ Ibid

pendidikan yang akuntabel. Akuntabilitas yang memiliki nilai kepercayaan tinggi bagi madrasah adalah jika madrasah melakukan akuntabilitas internal yaitu pengelolaan biaya pendidikan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, karena pada proses ini madrasah akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi akibat adanya penekanan nilai komitmen, loyalitas, rasa memiliki dan kecakapan yang didasarkan pada adanya tanggungjawab profesional.

Praktek manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat yang dilakukan secara transparan, akuntabel internal, akuntabel eksternal dan akuntabel dunia-akhirat akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat terhadap madrasah. Partisipasi masyarakat kepada madrasah dalam bentuk zakat, infak, sadakah dan wakaf akan mampu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif atau *naturalistik*.¹ Penggunaan penelitian kualitatif bertujuan supaya data-data yang diperoleh mendalam sesuai dengan makna dan fakta di lapangan.² Menurut Nasution, penelitian kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitar.³

B. Sumber Data dan Informan Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumber data yang sedikit belum bisa memberikan informasi yang memuaskan, maka dicari sumber data lain sampai data menjadi penuh. Dengan begitu maka informasi yang di dapat lebih lengkap. Sedangkan informan adalah responden yang terpercaya, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Pimpinan pondok pesantren Oemar Diyan dan Al Manar
2. Kepala Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar

¹John Creswell, *Riset Pendidikan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*, Kelima (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). h. 182.

²Yin Robert K., *Qualitative Research*, (New York: The Guilford Press, 2010). h. 20

³S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003). h. 5.

3. Bendahara Madrasah/Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar
4. Dewan Guru/Ustadz Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar
5. Komite Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar

C. Instrumen Penelitian

Terdapat beberapa kriteria yang mempengaruhi kualitas sebuah penelitian, yaitu kualitas instrumen dan metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif, kualitas instrumen berkaitan dengan validitas dan realibilitas instrumen dan kualitas dalam pengumpulan data berkaitan dengan tepatnya cara dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, oleh sebab itu instrumen yang diuji validitas dan realibilitas, belum tentu dapat menghasilkan data yang benar dan valid, apabila instrument tersebut tidak dipergunakan dengan metode yang tepat.

Penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti. Oleh karena itu seorang peneliti posisinya sebagai instrumen juga harus dilakukan validasi yaitu melihat seberapa siap peneliti untuk melakukan penelitian dan selanjutnya mampu terjun di lapangan. Validasi yang dilakukan kepada peneliti yang posisinya sebagai instrument utama meliputi validasi terhadap penguasaan metode penelitian kualitatif secara mendalam dan komprehensif, kemampuan secara teori dan wawasan dalam bidang yang ingin diteliti, kesiapan dan kemampuan peneliti untuk terjun ke lapangan baik secara keilmuan maupun biaya, maka peneliti sendiri harus mampu melakukan validasi dan evaluasi diri.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang berfungsi untuk alat penelitian atau alat pengumpulan data adalah peneliti itu

sendiri. Menurut Moleong,⁴ dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah si peneliti, yaitu posisi peneliti sebagai instrumen terpenting sebagai alat kunci dalam mengumpulkan data dan dibantu oleh instrumen yang lain yang sudah dipersiapkan, misalnya camera, alat perekam, tape recorder dan pedoman wawancara. Jadi instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, camera, alat perekam dan tape recorder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik wawancara, observasi langsung dan studi dokumentasi. Data yang dihasilkan melalui wawancara atau observasi dari satu subjek, setelah diinterpretasi, kemudian diperiksa kembali pada subjek lain, demikian seterusnya sampai peneliti menemui kejenuhan, yakni sumber data yang didatangi tetap memberikan data yang berkisar pada data yang dimiliki. Pengambilan data bercorak *simultaneous cross sectional* atau *member check* (dalam arti berbagai kegiatan kelakukan subjek penelitian tidak diambil pada subjek yang sama, namun pada subjek yang berbeda), kemudian diinterpretasi berdasarkan kemampuan peneliti melihat kecenderungan, pola, arah, interaksi faktor-faktor serta hal lainnya yang memacu atau menghambat perubahan untuk merumuskan hubungan baru berdasarkan unsur-unsur yang ada.⁵

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁶ Wawancara dilakukan untuk mencari informasi secara jelas dan detail dari pihak-pihak

⁴ Lexy Moleong, *Op.cit.*, h. 168.

⁵ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).

⁶ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung : Alfabeta,2004) h.74

yang berkompeten yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁷ Wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat non direktif, wawancara tidak terstruktur lebih didominasi pikiran dan perasaan responden, sedangkan wawancara terstruktur adalah wawancara yang sifatnya lebih direktif, yaitu pelaksanaan wawancara lebih banyak didesain dan disusun secara rinci oleh peneliti.⁸

2. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.⁹ Observasi dilakukan beberapa tahap, yaitu tahap observasi deskriptif (*descriptive observation*) yang menggambarkan situasi kegiatan dan aktivitas yang terjadi di lapangan. Setelah diadakan analisis dari hasil rekaman secara umum, kemudian disempitkan dengan pemilihan data.

Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang berkaitan dengan konteks sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman dari peristiwa di lapangan. Menggunakan teknik observasi dapat memperoleh manfaat seperti pendapat Patton yang disarikan oleh Nasution¹⁰ yaitu: (1) keberadaan peneliti dilapangan lebih mampu mendiskripsikan konteks data secara keseluruhan, (2) interaksi yang dilakukan secara langsung dapat melatih peneliti berpikir secara induktif, (3) peneliti bisa mengetahui sesuatu yang bisa saja orang lain mengetahuinya, (4) peneliti dapat menemukan fenomena yang tidak

⁷ Nana Sudjana Ibrahim, *Pengantar dan Penelitian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru,1989), h. 64

⁸ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). h. 118-119.

⁹ S Nasution, *Loc.Cit.* h.10.

¹⁰ *Ibid.* h. 59-60.

dijawab oleh responden, (5) peneliti dapat menemukan fenomena diluar pandangan responden, dan (6) ketika observasi peneliti tidak hanya dapat melakukan observasi tapi juga mendapatkan kesan-kesan secara pribadi.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencatat atau mengutip dari dokumen yang diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh langsung dari responden. Data yang ingin dikumpulkan dengan teknik dokumentasi adalah: (a) data berkaitan dengan sumber pembiayaan madrasah pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar, (b) data berkaitan dengan perencanaan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar, (c) data berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar, dan (d) data berkaitan dengan pengawasan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada pondok pesantren di kabupaten Aceh Besar.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal kegiatan penelitian hingga akhir dengan harapan adanya konsistensi dalam analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan Model Analisis Interaktif dari Miles dan Huberman. Dalam proses kualitatif Miles dan Huberman mengatakan: *we define analysis as consisting of three concurant flow of activity, data reduction, data display and conclusion drawing/ verification.*¹¹ Ketiga proses ini terjadi terus menerus selama pelaksanaan penelitian, baik pada periode pengumpulan data maupun setelah data terkumpul seluruhnya. Adapun uraian masing-

¹¹ Miles, Huberman, Michael Bray, *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods* (London: Sage Publication ltd., 1995), h 10.

masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus- gugus, menulis memo dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu guna menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.¹²
2. Penyajian data (*data display*) yaitu mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram tabel, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.¹³
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)/*verifikasi (varification)* merupakan bagian akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yang menemukan makna data yang telah disajikan. Cara yang digunakan bervariasi, dapat menggunakan perbandingan kontras, menemukan pola dan tema, pengklasteran (pengelompokkan), dan menghubungkan-hubungkan satu sama lain. Makna yang ditemukan peneliti harus diuji

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Afabeta, 2018). h. 338.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Afabeta, 2018). h. 231.

kebenarannya, kecocokannya dan kekokohnya.¹⁴

Dalam penelitian ini terdapat dua corak analisis data. *Pertama*, analisis saat mempertajam keabsahan data, melalui “*simultaneous cross sectional*”, dan *kedua*, melalui interpretasi pada data secara keseluruhan. Pada analisis corak pertama, dilakukan penyusunan data, yakni penyusunan kata-kata hasil wawancara, hasil observasi, dan studi dokumentasi berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian.¹⁵

Proses analisis data bersifat deskriptif dan informatif, maka proses interpretatif bersifat *reformatif* dan *transformatif*. Dalam proses interpretatif ini peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menafsirkan, mengadakan keterkaitan konteks, referensi konsep dan membangun pemahaman-pemahaman baru. Kegiatan ini akan tergambar proses interpretasi yang diperlukan dalam analisis dan sintesis multidisipliner, yakni menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan landasan teori (*konseptualisasi*) yang menjadi kerangka acuan (*frame of reference*) peneliti dan keterkaitannya dengan temuan-temuan dari penelitian lainnya yang relevan.

F. Pengecekan dan Uji Keabsahan Data

Subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif dan peneliti sebagai instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara dan observasi yang dianggap banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol. Untuk mengatasinya perlu dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Moleong¹⁶, menyatakan bahwa untuk

¹⁴ Sugiyono, *Loc.Cit.* h. 345.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). h. 11

¹⁶ Moleong, L. Y., *op. cit.*, h. 32-34.

menetapkan keabsahan data kualitatif diperlukan teknik pemeriksaan atas empat kriteria yaitu; (1) *Credibility* / derajat kepercayaan; (2) *Transferability* / keteralihan; (3) *Dependability* / kebergantungan dan; (4) *Confirmability* / kepastian.

1. *Credibility* (Validitas Internal)

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan yaitu; (a) memperpanjang waktu penelitian; (b), observasi detail yang terus menerus; (c) triangulasi atau pengecekan data dengan berbagai sumber sebagai pembanding terhadap data tersebut; (d) mengekspos hasil sementara atau akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitis dengan rekan sejawat; (e) kajian kasus negatif dengan mengumpulkan kasus yang tidak sesuai dengan pola yang ada sebagai pembanding; (f) membandingkan dengan hasil penelitian lain dan; (g) pengecekan data, penafsiran dan kesimpulan dengan sesama anggota penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode secara proporsional sesuai konteks yakni dengan membandingkan informasi/data yang didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumen.

2. *Transferability* (Validitas Eksternal)

Transferability atau keteralihan yaitu dapat tidaknya hasil penelitian ini ditransfer atau diterapkan pada situasi atau tempat yang lain. Ini dilakukan sebagai bentuk manfaat penelitian secara implementatif bisa diterapkan di lembaga tertentu.

3. *Dependability* (Reliabilitas)

Dependability atau kebergantungan yaitu kriteria kebenaran yang digunakan untuk menguji konsistensi hasil penelitian. Dalam penelitian kuantitatif *dependability* di sebut *reliability*. Untuk pengujian *dependability* dengan cara melakukan audit terhadap

keseluruhan proses penelitian. Disini peneliti harus mampu menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”.¹⁷

4. *Konfirmability* (Objektifitas)

Konfirmability atau kepastian yaitu kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Peneliti melakukan pemeriksaan ulang sekaligus konfirmasi ulang untuk memberikan keyakinan bahwa semua data yang didapat valid dan shahih (uji objektivitas penelitian). Menguji konfirmabilitas berarti kemampuan mengaitkan data penelitian dengan proses yang telah dilakukan oleh si peneliti. Bila data yang diperoleh dalam penelitian melalui tahapan-tahapan proses yang dilakukan secara benar maka penelitian itu telah memenuhi standar *konfirmability*. Artinya, sebuah penelitian yang mengabaikan proses atau proses tidak ada, maka penelitian tersebut diragukan kebenarannya.¹⁸

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian ini meliputi: tahap pra lapangan (*pra research*), tahap studi eksplorasi umum, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan. Tahap pra lapangan, yaitu tahapan studi persiapan atau studi orientasi dengan melakukan pra-proposal dan menyusun proposal penelitian tentative dan mengulang sumber pendukung yang diperlukan. Penentuan objek dan fokus penelitian ini didasarkan atas: (1) isu-isu umum tentang manajemen pembiayaan madrasah berbasis masyarakat; (2) mencari keunikan lokasi penelitian dan urgensi penelitian (3) mengkaji literature-literatur yang relevan serta melanjutkan perizinan kepada subyek penelitian (4) melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk menentukan keunikan dan urgensi penelitian.

¹⁷ *Ibid.*, 377.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Evaluasi, Op.cit.*, h. 378.

Tahap studi *eksplorasi umum*, yaitu suatu tahapan penelitian meliputi: (1) konsultasi, wawancara dan perizinan pada instansi yang berwenang; (2) penjajakan umum pada beberapa objek yang ditunjukkan untuk melakukan observasi dan wawancara secara global atau disebut *grand tour* dan *mini tour* guna menentukan pemilihan objek lebih lanjut; (3) studi literature dan menentukan kembali focus penelitian; (4) diskusi untuk memperoleh masukan; serta (5) konsultasi secara kontinyu untuk memperoleh legitimasi guna melanjutkan penelitian.

Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian, baik dari catatan lapangan, observasi, interview dan dokumentasi. Tahap analisis data, tahap ini meliputi kegiatan pengolahan data, mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi perkasus. Selanjutnya dilakukan pengecekan data dengan cara mengecek sumber data, metode yang digunakan dalam memperoleh data dan teknik yang digunakan dalam mencari data.

Tahap penulisan, yang meliputi (1) pengumpulan data yang dilakukan secara rinci dan mendalam guna menemukan kerangka konseptual tema-tema dilapangan; (2) pengumpulan data analisis data secara bersama-sama; (3) pengecekan hasil dan temuan penelitian., dan penulisan laporan hasil penelitian untuk diajukan pada tahap seminar penelitian; (4) penulisan hasil penelitian untuk diajukan pada tahap penyelesaian penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan

Pesantren Teungku (Tgk) Chiek Oemar Diyan merupakan salah satu pesantren modern terpadu yang ada di provinsi Aceh. Pesantren ini bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Islam Tengku Chiek Oemar Diyan. Pesantren berlokasi di Desa Krueng Lamkareung Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar diresmikan tanggal pada 27 Oktober 1990 atas prakarsa H. Saa'aduddin Jamal, S.E. Beliau adalah seorang aktifis muslim yang hampir seluruh hidupnya aktif di berbagai organisasi Islam seperti PII, HMI, MI dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Disamping sebagai aktifis beliau juga aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pernah menjadi wakil ketua DPRD Aceh dan terakhir ketika meninggal dunia tahun 1995 masih tercatat sebagai anggota MPR utusan daerah.¹

Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan masih eksis sampai sekarang dengan kurikulum terpadunya. Meskipun pesantren ini disebut modern namun pesantren ini tetap memadukan nilai-nilai tradisi dengan nilai-nilai modern kontemporer. Tujuan dari keterpaduan kurikulum tidak lain dan tidak bukan untuk memenuhi kebutuhan santri, masyarakat, dan kebutuhan zaman yang makin maju. Bukan hanya unggul dalam nilai agama tapi juga dapat unggul dalam nilai-nilai umum lainnya. Masa pendidikan di pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan ditempuh dalam 6 tahun, yaitu 3 tahun di Madrasah Aliyah dan 3 tahun di Madrasah Tsanawiyah. Untuk mendukung kreatifitas para santri juga tersedia berbagai ekstrakurikuler diantaranya latihan pidato tiga bahasa (Arab,

¹ Wawancara dengan MG, Anggota Majelis Guru Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan pada tanggal 15 Juni 2022.

Inggris, Indonesia), pelatihan wirausaha, kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris, seni kaligrafi al-quran, morning conversation, keterampilan tangan, bela diri, pramuka, drum band, teater dan kursus komputer.²

a. Identitas Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan

Nama Lembaga	Pondok Pesantren Tgk. Chiek Oemar Diyan
Nomor Statistik	510011060047
Akreditasi	Akreditasi A
Alamat	Desa Krueng Lamkareung Kec. Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
Kode Pos	23363
Nomor Telepon	+62218046703 / +6282360089001
Email	oemardiyani@gmail.com
Jenjang	SMP-SMA
Situs	www.oemardiyani.com
Jumlah Kelas / Jumlah Siswa	36 / 1321
Jumlah Guru	151
Jurusan	IPA / IPS / Agama

Tabel 1.1. Identitas Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan

² Wawancara dengan MG-Oemar Diyan, Anggota Majelis Guru Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan pada tanggal 15 Juni 2022.

b. Visi dan Misi Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan

Visi pesantren Tgk. Chiek Oemar Diyan membentuk manusia Indonesia yang berilmu, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT serta menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan misi yaitu (1) membentuk para santri menjadi kader penerus perjuangan untuk ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat, agama, bangsa, dan negara, (2) membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan ketrampilan, keseimbangan antara fikir dan zikir dalam rangka menghadapi kemajuan teknologi dan globalisasi, (3) menguasai ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum, (4) memiliki kepribadian yang luhur dan akhlak mulia, (5) mampu menguasai bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia dengan baik dan benar secara aktif, baik lisan maupun tulisan.³

c. Pimpinan Pesantren, Kepala Madrasah dan Kepala Tata Usaha

Tenaga pendidik dan kependidikan adalah orang-orang yang berperan penting di lembaga pendidikan, tanpa mereka maka proses pendidikan tidak bisa berjalan dengan semestinya. Adapun tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pimpinan pesantren sebanyak 151 orang. Adapun pimpinan pesantren, majlis guru, kepala madrasah aliyah dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

Pimpinan	Ust. H. Fakhruddin, M. Pd Ust. H. M. Yami Ma'shum
Sekretaris Pesantren	Ust. Irhamullah, S. Fil.I, M. Ag
Bendahara Pesantren	Ustz. Fatimah
Majlis Guru	Ust. Fakhruddin, M.Pd Ust. H. M. Yami Ma'shum

³ Dokumentasi di Kantor Administrasi Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan pada tanggal 15 Juni 2022.

	Ust. Safari, MA Ust. Jawahir, S. Pd. I Ust. Irhamullah, S. Fil.I, M. Ag
Kepala Madrasah Aliyah	Ust. Jawahir, S. Pd. I
Kepala Tata Usaha MA	Ustz. Maghfirah, A. Md
Bendahara MA	Ustz. Mawardhiah, S. Pd

Tabel 1.2. Struktur Pengurus Pesantren dan Madrasah Aliyah Oemar Diyan

2. Deskripsi Pesantren Al Manar

Pesantren Al Manar terletak di Gampong Lampermai, Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Pesantren ini didirikan atas prakarsa H. Azhar Manyak atau yang lebih dikenal Abu Manyak, seorang wirausaha kelahiran Aceh Besar. Lembaga ini dibangun pada tahun 2000 atas dasar keprihatinan beliau terhadap anak-anak yatim piatu korban konflik. Pada tahun 1999 dengan niat yang tulus beliau berkomunikasi dengan Prof. Dr. Safwan Idris, MA yang pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Rektor IAIN Ar-Raniry untuk mengutarakan niatnya membangun sebuah lembaga pendidikan yang santrinya terdiri dari anak-anak yatim. Melalui komunikasi ini, beliau ingin mendirikan sebuah Panti Asuhan di Aceh Besar.⁴

Atas saran Prof. Dr. Safwan Idris, MA pada waktu itu, agar lembaga pendidikan yang akan didirikan kelak dikelola oleh alumni Pondok Modern Gontor yang dianggap sudah berpengalaman dalam membina anak-anak dalam sistem beasrama. Abu Manyak diminta untuk berkomunikasi dengan Alumni Gontor yaitu Ust. H. Fakhruddin Lahmuddin selaku ketua Ikatan Alumni Pesantren Modern (IKPM) Gontor

⁴ Wawancara dengan P1 Al Manar, Pimpinan Pesantren Al Manar pada tanggal 11 Juni 2022.

dan Tgk. Syarifuddin selaku sekretaris. Ust. H. Fakhruddin akhirnya meminta waktu kepada Abu Manyak agar niat baik beliau untuk dimusyawarahkan dengan beberapa anggota IKPM lainnya.⁵

Setelah bermusyawarah dengan teman-teman alumni Gontor lainnya, serta melihat keseriusan dan pengorbanan Abu Manyak yang begitu besar maka Ust. H. Fakhruddin mengatakan di hadapan teman-teman IKPM bahwa alangkah naifnya jika seseorang diberikan kelebihan ilmu walaupun sedikit tidak digunakan untuk membantu kemashlahatan umat, terutama membantu kelangsungan pendidikan anak-anak yatim. Maka pada waktu itu teman-teman alumni Gontor tergugah hatinya dan menyanggupi untuk ikut serta dalam membina pesantren ini. Maka pada tahun 2001 bulan Juli resmilah lembaga pendidikan ini dimulai. Lembaga ini bernama Pesantren Modern Al Manar.⁶

Al Manar sendiri berasal dari kata Arab *nawwara-yunawwiru* yang artinya cahaya atau nur sedang *manaara* yang berarti tugu yang memancarkan cahaya, dengan penafsirannya bahwa Pesantren ini nantinya diharapkan dapat memancarkan cahaya bagi umat ini dalam melahirkan generasi Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia serta ke seluruh penjuru dunia. Kata Al Manar juga diilhami dari tugu yang berdiri sebelum Pesantren dibangun yang dahulunya dinamakan Tugu Bungong Jeumpa. Nama tugu tersebut akhirnya menjadi nama Yayasan yang didirikan oleh Abu Manyak yaitu Yayasan Bungong Jeumpa.⁷

Pada awalnya (2001) Pesantren Modern Al-Manar hanya menerima santri putra yang berjumlah 71 santri. Sedangkan santri putri baru diterima

⁵ Wawancara dengan MG-Al Manar, Anggota Majelis Guru Pesantren Al Manar pada tanggal 30 Juni 2022.

⁶ Wawancara dengan P1-Al Manar, Pimpinan Pesantren Al Manar pada tanggal 11 Juni 2022.

⁷ <https://almanar.ponpes.id/sejarah-pesantren-modern-al-manar/> di akses pada tanggal 21 Juli 2022

pada tahun pelajaran 2009/2010. Pesantren Modern Al-Manar menerima santri putri perdana atas permintaan wali santri dan masyarakat sekitar. Dan pada tahun ke empat belas ini jumlah santri mencapai 450 santri (terdiri dari 238 Santri Putra dan 152 Santri Putri) yang terdiri dari 89 santri yatim dan yatim piatu, sedangkan 361 santri lainnya adalah santri umum dengan biaya mandiri.⁸

Pesantren Modern Al-Manar yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Islam dan Penyantunan Anak Yatim “Bungong Jeumpa” adalah sebuah lembaga pendidikan Islam swasta dengan motto berdiri di atas dan untuk semua golongan, tidak berpihak pada golongan, aliran dan partai manapun. Pesantren Modern ini bertujuan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia dan menciptakan insan kamil yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual demi pembangunan agama, bangsa dan negara. Pesantren Modern ini adalah lembaga pendidikan formal terpadu dimana santrinya bermukim di asrama.⁹

Maksud dan tujuan pendirian Pesantren Modern Al-Manar adalah: (1) membentuk manusia beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT serta menghayati dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan al-Qur’ân dan al-Sunnah, (2) membentuk kader muslim yang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, memiliki ketangguhan ilmu dan iman, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat madani, agama, bangsa dan negara, (3) membangun sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu pengetahuan umum,

⁸ <https://almanar.ponpes.id/sejarah-pesantren-modern-al-manar/> di akses pada tanggal 21 Juli 2022

⁹ Wawancara dengan P1-Al Manar, Pimpinan Pesantren Al Manar pada tanggal 11 Juni 2022.

memiliki ketrampilan memadai, memahami dan menghayati ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁰

Berikut struktur pimpinan pesantren, majlis guru, kepala madrasah Aliyah, kepala tata usaha, bendahara pesantren dan bendahara madrasah:

Pimpinan	Ust. H. Fakhruddin, M. Pd Ust. Ikham M. Amin, M. Pd
Majlis Guru	Ust. H. Fakhruddin Lahmuddin, M. Pd Ust. Ikham M. Amin, M. Pd Ust. Muhammad Syafrizal, S. Ag (Koord. Keuangan) Ust. Zulkhairi Sofyan, MA (Koordinator Bahasa) Ust. Awaluddin, S. Pd. I, M. Pd (Koord. Pengajaran) Ust. H. Syahrul Ramadhan, MA (Koord. Pengasuhan)
Bendahara	Ust. Zawil Kiram
Kepala Madrasah Aliyah	Ust. Putrayadi, S. Pd
Kepala Tata Usaha MA	Ust. Azhari, A. Md
Bendahara MA	Ust. Safrizal, S.Pd

Tabel 2.3. Struktur Pengurus Pesantren dan Madrasah Al Manar

B. Hasil Penelitian

1. Sumber Pembiayaan Madrasah Aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar

Adapun sumber dana yang diperoleh madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan MAS Al Manar berasal dari berbagai sumber,

¹⁰ <https://almanar.ponpes.id/sejarah-pesantren-modern-al-manar/> di akses pada tanggal 21 Juli 2022

diantaranya pemerintah, yayasan, orang tua santri, infaq, shadaqah, zakat dan waqaf serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Sumber pembiayaan madrasah yang berasal dari berbagai sumber tersebut dikelola oleh pesantren secara berpusat (satu pintu). Berkaitan dengan sumber pembiayaan madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dijelaskan oleh pimpinan pesantren:

“Secara kepesantrenan sumber biaya itu sebagian besar dari masyarakat atau orang tua santri (dalam bentuk uang pembangunan, SPP



dan biaya-biaya pendidikan lainnya). Sumber pembiayaan madrasah selain sumber dana dari orang tua santri tadi ada juga dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya dana BOS. Selanjutnya ada juga

pembiayaan yang bersumber dari umat atau masyarakat seperti waqaf, zakat, shadaqah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sumber ini dapat diserahkan secara langsung ke pimpinan pesantren. Selain itu kami disini juga ada sumber biaya yang berasal dari internal lembaga, misalnya dari hasil pengelolaan kantin dan koperasi pesantren”. (MG-Oemar Diyan).¹¹

Sumber pembiayaan madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan, yaitu bersumber dari orang tua santri, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, usaha mandiri madrasah, sumber lain seperti waqaf, zakat, shadaqah dan hibah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sumber pendapatan madrasah dari

¹¹ Wawancara dengan MG-Oemar Diyan, Anggota Majelis Guru Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan pada tanggal 15 Juni 2022.

pemerintah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sumber dana yang berasal dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan biaya terhadap kelancaran penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Sumber dana dari dunia usaha dan industri dilakukan melalui kerja sama dalam berbagai kegiatan, baik bantuan berupa uang maupun berupa bantuan fasilitas untuk kelancaran pendidikan di madrasah.

Berdasarkan hasil penelitian sumber pembiayaan pada madrasah aliyah Al Manar seperti dijelaskan oleh pimpinan pesantren sebagai berikut:

“Sistem pembiayaan pada pesantren kami masuk satu pintu, yaitu melalui bendahara pesantren. Madrasah mengusulkan anggaran pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan setiap program kegiatan kepada pesantren. Ada beberapa sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, yaitu dari orang tua santri, masyarakat, yayasan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Kami disini juga ada badan zakat, infaq dan shadaqah. Selain itu ada juga sumber biaya dari hasil usaha pesantren, misalnya kantin dan koperasi pesantren. (P1-Al Manar).¹²

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pada dua lokasi, yaitu pesantren Tengku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar bahwa sumber pembiayaan pendidikan dua madrasah tersebut dominan dari orang tua santri, meskipun ada juga sumber pembiayaan dari pemerintah dan masyarakat secara umum. Kedua madrasah menerima infaq, shadaqah, zakat dan waqaf dari masyarakat. Pesantren Teungku Chiek Oemar Diyan

¹² Wawancara dengan P1-Al Manar, Pimpinan Pesantren Al Manar pada tanggal 11 Juni 2022.

pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk infaq, shadaqah, zakat dan waqaf diterima melalui bendahara pesantren dan tidak ada badan zakat dan waqaf di pesantren. Sedangkan di pesantren Al Manar sudah dibentuk badan zakat dan waqaf secara independen di pesantren, badan tersebut mengelola sumber pembiayaan dalam bentuk infaq, shadaqah, zakat dan waqaf dari masyarakat.

2. Perencanaan Pembiayaan Madrasah Aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar

Perencanaan pembiayaan madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar tahun pelajaran 2021/2022 telah dimusyawarahkan dan disusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) tahun pelajaran 2021/2022. Hasil penelitian pada madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan berkaitan dengan penyusunan RAPBM kepala madrasah menjelaskan:

“Setiap tahun pelajaran kita menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Kepala madrasah dan tim menyusun pedoman pengelolaan anggaran yang telah disusun dalam RAPBM. Langkah awal tentu melakukan analisis SWOT dalam penyusunan RAPBM serta menentukan program kerja atau rincian program madrasah satu tahun kedepan. RAPBM yang sudah disusun kemudian diajukan ke pimpinan pesantren untuk mendapatkan persetujuan”. (KM-Oemar Diyan).¹³

¹³ Wawancara dengan KM-Oemar Diyan, Kepala Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan pada tanggal 15 Juni 2022.

Kepala madrasah bersama tim dalam melakukan perencanaan menggunakan empat fase perencanaan anggaran, yaitu (a) merencanakan anggaran, meliputi kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan



prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan personal yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost effectiveness* dan membuat rekomendasi alternatif

pendekatan untuk mencapai sasaran; (b) mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia; (c) mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu melaksanakan pembukuan, melakukan pembelajaran dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan, sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan (d) menilai pelaksanaan anggaran yaitu menilai bagaimana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan perencanaan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar melibatkan seluruh *stake holder* pendidikan, yaitu kepala madrasah, dewan guru, pimpinan pesantren dan komite madrasah sebagai perwakilan dari orang tua santri dan masyarakat.

“Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Kita melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan

(stake holder) kepala madrasah, pimpinan pesantren, dewan guru, komite sekolah dan majlis guru. Tim menyusun RAPBM setiap tahun sesuai dengan kebutuhan, kemampuan anggaran serta peraturan yang berlaku. RAPBM yang telah disusun oleh tim tadi kemudian diajukan ke pimpinan pesantren untuk mendapatkan persetujuan". (KM-AI Manar).¹⁴

Penganggaran pembiayaan di madrasah aliyah Oemar Diyan dan Al Manar melibatkan kepala madrasah, bendahara, dewan guru, komite madrasah, pimpinan pesantren dan yayasan untuk bersama-sama melakukan penyusunan penetapan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Dalam penyusunan anggaran memperhatikan hal apa saja yang diutamakan dalam setiap kebutuhan program yang akan dikelola. Penyusunan anggaran pembiayaan di MAS Oemar Diyan dan Al Manar dilakukan dengan agenda pertemuan rapat yang bertempat di kantor madrasah aliyah. Penganggaran tersebut dilakukan setiap pada awal tahun anggaran, kemudian setelah rangkaian prosedur penyusunan telah selesai, dilanjutkan dengan merevisi apabila ada yang kurang atau kelebihan anggaran, dilanjut dengan pengesahan yang dibubui dengan tanda tangan berstempel oleh kepala dan bendahara madrasah, diketahui oleh komite madrasah serta disetujui oleh pimpinan pesantren.¹⁵

3. Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah Aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar

Dalam kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat di madrasah aliyah Oemar Diyan dan Al Manar dilakukan dengan pencatatan dan pembukuan yang rinci dan jelas. Proses pelaksanaan pembiayaan dapat diketahui melalui enam indikator, yaitu: (a)

¹⁴ Wawancara dengan KM-AI Manar, Kepala Madrasah Aliyah Al Manar pada tanggal 11 Juni 2022.

¹⁵ Wawancara dengan KM-Oemar Diyan, Kepala Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan pada tanggal 15 Juni 2022.

Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (APBM) disosialisasikan kepada seluruh warga madrasah, (b) pelaksanaan APBM sesuai dengan yang direncanakan dalam RAPBM, (c) madrasah memiliki buku kontrol pemasukan, (d) madrasah memiliki buku kas/pembukuan keuangan madrasah, (e) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan (f) ada laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan madrasah.

Pelaksanaan pembiayaan madrasah Aliyah Oemar Diyan dan Al Manar dilakukan dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran dana. Proses penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah melalui persetujuan yayasan dan pimpinan pesantren sesuai dengan kebutuhan yang telah disusun oleh madrasah dalam RAPBM. Bendahara madrasah dalam penerimaan dan pengeluaran dana madrasah diketahui dan melalui persetujuan kepala madrasah.¹⁶

4. Pengawasan Pembiayaan Madrasah Aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar

Pengawasan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada madrasah aliyah Oemar Diyan dan Al Manar, dilakukan setelah seluruh penggunaan keuangan tiap bidang-bidang yang ditentukan secara berkala dilaporkan kepada bendahara madrasah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, triwulan dan tahunan, kemudian bendahara melakukan pendataan seluruh pengeluaran serta meminta bukti pengeluaran berupa nota atau kuitansi dari para pengguna anggaran.

¹⁶ Wawancara dengan KM-Oemar Diyan, Kepala Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan pada tanggal 15 Juni 2022.

Proses pengawasan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada madrasah aliyah Oemar Diyan dan Al Manar dilakukan dari dua arah yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan pihak internal



yaitu, yayasan, pimpinan pesantren, majlis guru, kepala madrasah, komite madrasah dengan cara mengecek setiap 3 bulan sekali kepada bendahara. Sedangkan sumber dana dari pemerintah pengawasan dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat

Jenderal Kementerian Agama, Pemerintah Daerah dan sangat tergantung sumber dana.

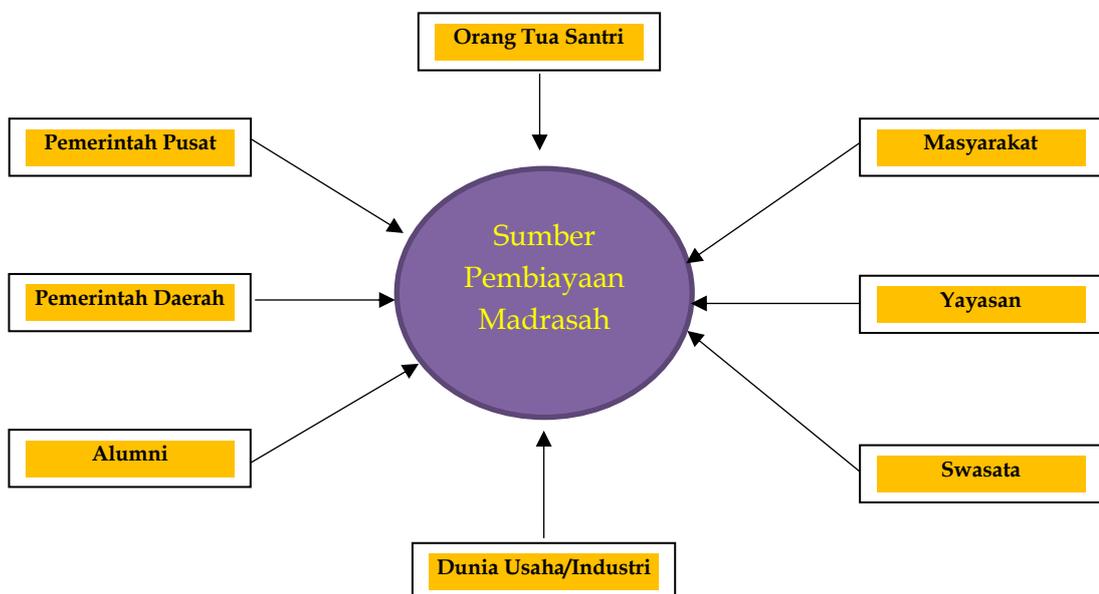
C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sumber Pembiayaan Madrasah Aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar

Menurut Irsan Habsyi sumber-sumber pendapatan madrasah/sekolah dapat bersumber dari pemerintah, usaha mandiri madrasah, orang tua siswa, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan swasta pembiayaan pendidikan juga bersumber dari yayasan itu sendiri dan masyarakat secara umum yang ingin membantu. Sumber pendapatan madrasah/sekolah adalah dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana yang

berasal dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung dan iuran komite. Sumber dana dari dunia usaha dan industri dilakukan melalui kerja sama dalam berbagai kegiatan, baik bantuan berupa uang maupun berupa bantuan fasilitas pendidikan.¹⁷

Sumber pembiayaan madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar dominan dari orang tua santri, pemerintah pihak yayasan dan masyarakat secara umum. Sedangkan sekolah-sekolah negeri sumber pembiayaan pendidikan sangat dominan dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, yaitu gaji, serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas (OPF), dan juga termasuk dana dari orang tua siswa dan sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha. Berikut ini gambaran sumber-sumber pembiayaan pendidikan pada madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar:



Gambar 1.1. Sumber-Sumber Pembiayaan Madrasah

¹⁷ Irsan Habsyi, Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada SMP Negeri 13 Kota Ternate, *Jurnal Pendidikan*, ISSN 1693-4164, Vol. 13 No.2 Juni 2015, 547.

Beberapa sumber pembiayaan yang diperoleh madrasah aliyah Tgk Chiek Oemar Diyan dan Al Manar, yaitu diantaranya bersumber dari orang tua santri, pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, yayasan dan masyarakat dalam bentuk infaq, shadaqah, zakat dan waqaf serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Sumber pembiayaan pendidikan tersebut sudah sesuai dengan pendapat Akdon, yaitu sumber-sumber keuangan madrasah/sekolah dapat bersumber dari orang tua siswa, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dunia usaha, dan alumni.¹⁸

Perlu dipahami bahwa pembiayaan sangat berhubungan dengan kepercayaan. Artinya apabila madrasah ingin mendapat dukungan sumber pembiayaan dari masyarakat, maka program yang dibuat oleh madrasah harus memiliki daya jual, menarik, bermutu serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Dengan kata lain madrasah harus mampu mengemas program Pendidikan yang menyakinkan masyarakat sebagai pemilik dan sumber pembiayaan Pendidikan.

Di Indonesia persoalan pembiayaan pendidikan secara jelas menjadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Secara yuridis formal pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, sehingga dengan adanya peran serta masyarakat dapat menutupi kekurangan dari alokasi 20% tersebut. Di sinilah penting peran dan keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah melalui pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat.

¹⁸ Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, hal. 87

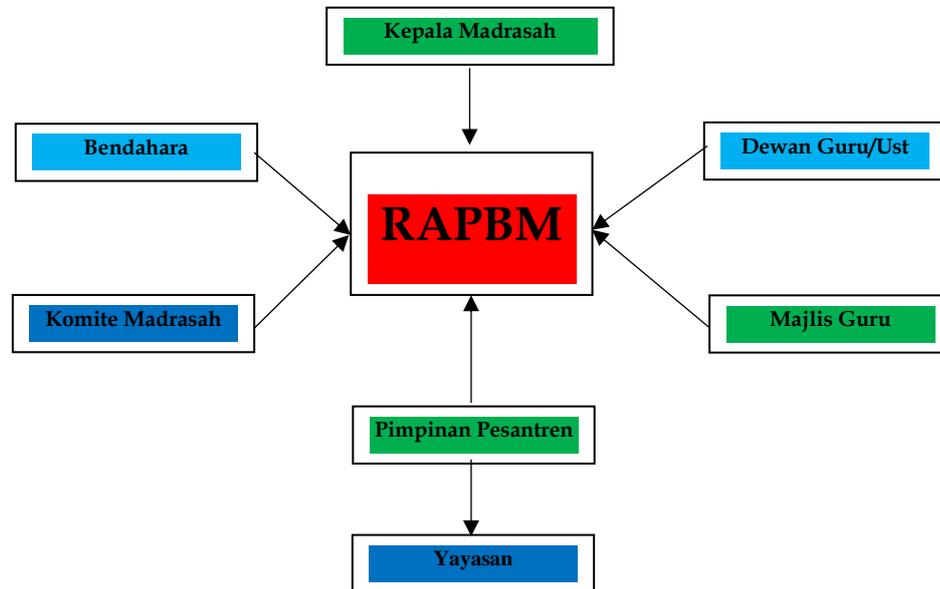
2. Perencanaan Pembiayaan Madrasah Aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar

Menurut Liphan ada empat fase perencanaan anggaran, yaitu (a) tahap awal merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan personal yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis *cost effectiveness* dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran; (b) mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan secara terukur dan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia; (c) mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu melaksanakan pembukuan, melakukan pembelajaran dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan, sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan (d) mengevaluasi pelaksanaan anggaran yaitu menilai sejauhmana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi jika ada kekurangan dan kelemahan untuk perbaikan anggaran yang akan datang.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian penganggaran pembiayaan di madrasah aliyah Oemar Diyan dan madrasah aliyah Al Manar melibatkan kepala madrasah, bendahara, dewan guru, komite, anggota majlis guru, dan pimpinan pesantren serta yayasan untuk bersama-sama melakukan penyusunan penetapan anggaran sesuai dengan kebutuhan anggaran madrasah. Dalam proses penganggaran memperhatikan hal-hal utama dan pokok yang menjadi prioritas untuk keberhasilan program pendidikan di madrasah. Berikut ini pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan

¹⁹ Armida, Sistem Penganggaran Pendidikan, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 13 No. 2 Oktober 2012, Universitas Pendidikan Indonesia ISSN 1412-565x, 5-6.

Rencana Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM):



Gambar 1.2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan RAPBM

Penganggaran pembiayaan madrasah dilakukan setiap awal tahun anggaran. Penyusunan anggaran pembiayaan madrasah aliyah Oemar Diyan dan Al Manar dilakukan dengan agenda pertemuan rapat yang bertempat di kantor madrasah. Dalam proses penyusunan apabila ada poin yang perlu revisi atau masih ada yang kurang atau kelebihan anggaran maka dilakukan penyempurnaan. Setelah revisi anggaran selesai dilanjutkan dengan pengesahan yang dibubui dengan tanda tangan berstempel oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah, diketahui oleh komite madrasah serta disetujui oleh pimpinan pesantren.²⁰ Secara teknis setelah anggaran disetujui oleh pimpinan kemudian penginputan data oleh operator madrasah sesuai dengan jumlah biaya yang telah disepakati, operator memasukkan ke setiap komponen biaya sesuai dengan hasil akhir

²⁰ Wanwawancara dengan KM, Kepala Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan pada tanggal 15 Juni 2022.

setelah anggaran tersebut disahkan.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Asfila, dkk, dalam rangka mempergunakan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan dengan pos yang telah diberikan oleh pemerintah, maka kepala madrasah melakukan musyawarah dengan warga madrasah dalam merencanakan pembiayaan pendidikan madrasah, sehingga pembiayaan pendidikan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Perencanaan pembiayaan pendidikan biasanya dilakukan pada awal tahun walaupun mungkin dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum turun, perencanaan pembiayaan pendidikan yang direncanakan tersebut dengan memprioritas hal-hal yang penting dan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan.²¹

RAPBM dibuat hanya untuk satu tahun anggaran pelajaran mendatang dan terdiri dari 2 bagian yaitu Pendapatan dan Pengeluaran. RAPBM mencakup semua biaya dan pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan, khususnya untuk tahun anggaran mendatang. Pendapatan yang dicantumkan di RAPBM hanya mencakup dana dalam bentuk uang, baik yang akan diterima dan dikelola langsung oleh madrasah. Secara rinci langkah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM), yaitu:

- a. Inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan atau pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, analisis kebutuhan tahun berikutnya berdasarkan pertimbangan dan masukan dari seluruh warga

²¹ Asfila, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Mtsn Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0156 pp. 123-129, Volume 3, No. 4, November 2015, 125.

madrasah, komite madrasah dan pimpinan pesantren.

- b. Inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun pengembangan.
- c. Penyusunan Rencana Kegiatan Madrasah (RKM) yang lengkap berdasarkan langkah poin (a) dan (b). Kepala madrasah membuat tabel rencana kegiatan madrasah yang terdiri dari uraian kegiatan, sasaran, perincian dana dari berbagai sumber, dan jumlah dana.
- d. Selanjutnya penyusunan RAPBM, kepala madrasah membuat tabel RAPBM yang terdiri dari kolom-kolom, yaitu kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya. Tabel tersebut diisi kemudian ditandatangani oleh kepala madrasah, ketua komite madrasah dan diketahui oleh pimpinan pesantren dan Kementerian Agama Kabupaten.

3. Pelaksanaan Pembiayaan Madrasah Aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar

Penganggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. *Budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.²² Dalam penentuan biaya satuan pendidikan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran Pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah peserta didik. Sedangkan pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per

²² Nanang Fattah. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). Hal. 47.

komponen pendidikan yang digunakan oleh peserta didik.²³

Budgeting berfungsi sebagai alat pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana atau penyusunan program dan penganggaran (*planning programming budgeting system*). Perencanaan anggaran merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sarana dan sumber daya yang tersedia.

Dalam kegiatan *accounting* madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar melakukan pencatatan dan pembukuan secara rinci dan jelas. Proses *accounting* ini dapat diketahui melalui enam indikator, yaitu: (a) APBM disosialisasikan kepada warga madrasah, (b) pelaksanaan APBM sesuai dengan yang direncanakan, (c) ada buku kontrol pemasukan dan pengeluaran, (d) ada buku kas/pembukuan keuangan, (e) SPJ dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan (f) ada berita acara pemeriksaan administrasi keuangan.

Secara umum pelaksanaan pembiayaan madrasah Aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar dilakukan dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran dana. Bendahara madrasah dalam penerimaan dan pengeluaran wajib diketahui dan persetujuan kepala madrasah. Berikut ini diuraikan berkaitan dengan kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana, yaitu:

a. Penerimaan Dana

Tahap awal dalam menentukan pembukuan yang baik dan sistematis, yaitu melakukan pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan, kegiatan ini meliputi: (1) mengidentifikasi dan mengukur data keuangan, yakni mencatat segala bentuk transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis selama satu periode dalam buku jurnal. Pengukuran dengan

²³ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006). Hal. 7.

menggunakan pengeluaran satuan mata uang; (2) memproses data keuangan, yaitu pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran yang mencakup kegiatan ini adalah pencatatan transaksi seluruh data yang dikumpulkan secara kronologis kemudian digolongkan kedalam kategorinya dan disajikan secara ringkas; (3) pelaporan data keuangan, merupakan suatu kegiatan yang oleh kedua lembaga madrasah ini dilakukan oleh internal pesantren dan lembaga luar secara eksternal. Secara internal pelaporan pimpinan pesantren, majlis guru, komite madrasah dan pihak Yayasan. Sedangkan secara eksternal pelaporan kepada pemerintah dan tergantung asal sumber dana. Sumber dana dari kementerian agama maka pelaporan ke kementerian agama dan dana yang bersumber dari instansi lain pertanggungjawaban dilaporkan kepada instansi tersebut.²⁴

Penerimaan pembiayaan pada madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar juga berasal dari pendapatan non rutin. Pendapatan non rutin berasal dari bantuan pemerintah seperti BOS, dan badan usaha yang lainnya seperti koperasi, kerjasama produksi percetakan & sablon, kantin, sawah, yayasan, komite, infak baik yang berasal dari santri, alumni, orang tua santri dan masyarakat secara umum. Menurut Siagian bahwa penerimaan merupakan sumber dana yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan baik dari intern lembaga seperti iuran dari siswa maupun bantuan dari luar seperti instansi pemerintah maupun swasta. Penerimaan keuangan madrasah dari berbagai sumber perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

Proses penerimaan keuangan madrasah melalui persetujuan yayasan dan pimpinan pesantren sesuai dengan kebutuhan yang telah disusun dalam RAPBM. Sumber penerimaan madrasah banyak berasal dari orang

²⁴ Wawancara dengan KM, Kepala Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan pada tanggal 15 Juni 2022.

tua santri diterima oleh bagian keuangan pesantren secara satu pintu. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari pemerintah masuk secara satu pintu ke rekening pesantren. Madrasah menerima anggaran sesuai dengan anggaran yang telah disusun dalam RAPBM melalui persetujuan pimpinan dan pihak yayasan.

b. Pengeluaran Dana

Sebagaimana digambarkan dalam peta konsep bahwa pengeluaran dana di madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar dibagi menjadi dua yaitu biaya operasional dan biaya investasi. Biaya operasional kalau yang bersumber dari pemerintah diantaranya menggunakan dana yang bersumber dari BOS, sedangkan biaya investasi bersumber dari pendapatan koperasi, kerjasama produksi kantin, yayasan, komite, infak, shadaqah, zakat, dan waqaf.²⁵ Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 90 tahun 2003, yaitu pembiayaan tersebut dipergunakan sebagai biaya investasi, biaya operasi dan personal yang mengarah pada lembaga pendidikan yang berkualitas. Biaya investasi madrasah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi madrasah meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan madrasah serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan biaya operasi pendidikan tak langsung lainnya.²⁶

Menurut Mulyasa, pembayaran merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti tenaga

²⁵ Wanwawancara dengan KM, Kepala Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan pada tanggal 15 Juni 2022.

²⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan Madrasah, pasal 62, 22

administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan, apakah digambarkan dalam anggaran biaya atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah/madrasah menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat.²⁷

Menurut Akdon, struktur biaya pendidikan terdiri dari, (1) biaya satuan pendidikan, (2) biaya personal, dan (3) biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Sudah terlihat secara terperinci dana-dana yang dikeluarkan, dan dana masuk yang didapat.²⁸ Kemudian dalam kegiatan pembukuan keuangan selain menggunakan acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, madrasah juga menggunakan metode *akrual basis* dengan mencatat transaksi yang sedang dilakukan meskipun belum menerima atau mengeluarkan uang kas. Sony Lamosini menjelaskan bahwa *basis akrual* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.²⁹

Jenis model yang digunakan dalam pembukuan menggunakan model turunan delapan standar nasional pendidikan. Kalau dalam teori Akdon biasa disebut dengan model *fishbone*, yaitu konsep model penentuan biaya sekolah/madrasah model tulang ikan dari Ishikawa. Penentuan biaya sekolah dikelompokkan menjadi 8 komponen, hal ini sesuai dengan standar komponen pendidikan nasional.³⁰ Pelaksanaan pembukuan keuangan di madrasah aliyah Oemar Diyan dan Al Manar menggunakan pembukuan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, buku

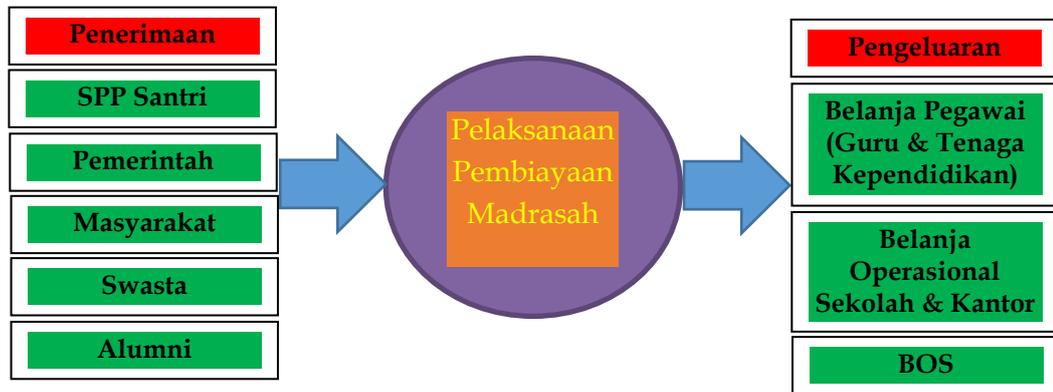
²⁷ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005), hal. 203-204.

²⁸ Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*,...43

²⁹ Sony Lamosini, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Tomoho, *Jurnal Emba*, Issn 2303-1174, Vol.4 No.1 Maret 2016, 225

³⁰ Ibid.

pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal. Berikut gambar pelaksanaan pembiayaan madrasah:



Gambar 1.3. Pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan Madrasah

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembukuan yang dilakukan oleh madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan dana berasal dari pendapatan non rutin. Sedangkan pengeluaran dana digunakan untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari BOS pusat, SPP santri dan biaya investasi lainnya. Model pembukuan yang digunakan yaitu model *fishbone* dengan mengelompokkan delapan standar nasional pendidikan. Sementara untuk jenis buku yang digunakan yaitu berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal.

4. Pengawasan Pembiayaan Madrasah Aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar

Menurut Nanang Fattah, proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu memantau (*monitoring*) menilai dan melaporkan. Proses

evaluasi ini dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen keuangan berjalan secara efektif dan efisien dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya. Seseorang yang terlibat dalam proses manajemen pembiayaan harus mampu mempertanggungjawabkan pembiayaan tersebut baik secara moral maupun peraturan yang berlaku.

Pengawasan dan pengukuran hasil kerja (*auditing*) pada madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar, dilaksanakan setelah seluruh penggunaan keuangan tiap bidang-bidang yang ditentukan secara berkala dilaporkan kepada bendahara madrasah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, triwulan dan tahunan, kemudian bendahara melakukan pendataan seluruh pengeluaran serta meminta bukti pengeluaran berupa nota atau kuitansi dari para pengguna anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan pembiayaan pendidikan pada madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar dilakukan melalui dua arah, yaitu pengawasan secara internal dan pengawasan secara eksternal.

a. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh kepala madrasah secara berkala dan berkesinambungan terutama kepada bendahara madrasah. Tujuannya tidak lain membantu pengawasan keuangan madrasah agar menghindari ketidaksesuaian penggunaan keuangan sesuai dengan RAPBM dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan pembiayaan di madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al Manar selain dilakukan oleh kepala madrasah, juga pengawasan dilakukan oleh pimpinan pesantren, komite madrasah dan pihak yayasan. Pengawasan pembiayaan di bagi menjadi dua, yaitu dari internal pesantren dan dari lembaga eksternal pesantren.³¹

³¹ Wanwawancara dengan KM, Kepala Madrasah Aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan pada tanggal 15 Juni 2022.

Pengawasan juga dilakukan oleh kepala madrasah tidak hanya sumber dari internal saja melainkan penggunaan keuangan yang bersumber dari pihak eksternal. Pengawasan bertujuan dan berupaya membantu bendahara dengan mempersiapkan bukti-bukti keuangan yang membutuhkan legalisasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan anggaran. Pengawasan yang dilakukan kepala madrasah juga bertujuan untuk memastikan pos penggunaan anggaran yang telah dirancang tidak melenceng dan terlaksana dengan maksimal.

Prinsip pelaksanaan pengawasan ini tergambar sebagai berikut: (1) dilakukan terus menerus dan berkesinambungan; (2) dilaksanakan secara efektif, diarahkan kepada jenis kegiatan yang mengandung resiko kesalahan dan penyimpangan, juga kegiatan strategis; (3) dilaksanakan secara komprehensif, cepat, tepat, tertib, dan didasarkan pada penilaian yang objektif; (4) berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak bertindak subjektif; (5) pencatatan dan pelaporan yang faktual, rasional, dan tepat waktu untuk mendeteksi penyimpangan; (6) orientasinya adalah masa sekarang dan masa mendatang; (7) sifatnya edukatif atau pembinaan meskipun terjadi penyimpangan dan kesalahan; dan (8) melakukan pencegahan secara tuntas pada setiap kesalahan atau penyimpangan.

b. Pengawasan Eksternal

Proses pengawasan eksternal dilaksanakan dengan menyesuaikan program monitoring, pendampingan dan pelaporan dari pihak dinas terkait. Baik untuk penggunaan keuangan yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental, baik yang dipergunakan dalam kurun waktu panjang maupun penggunaan anggaran yang dipergunakan dalam kurun waktu yang singkat.

Pengukuran tingkat berhasil atau tidak berhasil penggunaan anggaran pendidikan di madrasah, maka terlihat dari madrasah mengikuti

prosedur dan pedoman operasional penggunaan anggaran yang diberikan oleh pihak dinas atau instansi terkait. Selain pengawasan yang bersifat rutin, dinas atau instansi pemerintah lain yang telah memberikan bantuan keuangan madrasah, juga akan melaksanakan pengukuran hasil kerja atas penggunaan keuangan yang telah diberikan kepada madrasah.

Bantuan pembiayaan pembangunan gedung ruang belajar santri atau rehab ringan dan sedang gedung madrasah, apabila pembiayaan dari dinas atau instansi terkait maka instansi itu yang akan melakukan pemeriksaan terhadap capaian realisasi anggaran tersebut. Begitu pula pemerintah daerah, yang secara sah dan tidak mengikat memberikan bantuan bagi keberlanjutan dan kemajuan madrasah, maka melalui bidangnya akan melakukan peninjauan atas hasil kerja penggunaan anggaran tersebut. Diantara lembaga pengawas fungsional pemerintah yang telah ditentukan adalah BPK dan Inspektorat jenderal.



Gambar 1.4. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan Melalui Dua Arah

Pengawasan pembiayaan madrasah aliyah Tgk. Chiek Oemar Diyan dan Al manar secara internal dilakukan oleh yayasan, pimpinan pesantren, majlis guru, kepala madrasah dan komite madrasah. Pengawasan dilakukan dengan cara mengecek setiap 3 bulan sekali kepada bendahara. Pengawasan pembiayaan yang sumber anggaran dari pemerintah maka pengawasan dari pihak eksternal seperti BPK dan Inspektorat Jenderal

Kementerian Agama dari Jakarta dan sangat tergantung dengan sumber dana yang digunakan oleh madrasah.

Manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis masyarakat harus mampu dipraktekkan oleh pihak madrasah dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas internal-eksternal dan akuntabilitas dunia-akhirat. Dengan demikian akan mendorong partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Partisipasi masyarakat kepada madrasah dalam bentuk zakat, infak, sadakah dan wakaf bila dikelola dengan manajemen baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar, yaitu bersumber dari orang tua santri, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, usaha mandiri madrasah, sumber lain seperti waqaf, zakat, shadaqah dan hibah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Perencanaan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar melibatkan seluruh *stakeholders* pendidikan, yaitu kepala madrasah, dewan guru, pimpinan pesantren, majlis guru, dan komite madrasah sebagai perwakilan dari orang tua santri dan masyarakat. Perencanaan pembiayaan berdasarkan hasil rapat dan bersama-sama melakukan penyusunan penetapan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses perencanaan memperhatikan kebutuhan utama dan pokok dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah anggaran disepakati, selanjutnya memasukkan ke setiap komponen sesuai dengan hasil akhir setelah anggaran tersebut di sahkan.
3. Proses pelaksanaan pembiayaan madrasah berbasis masyarakat pada madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan dana berasal dari berbagai sumber, diantaranya pemerintah, yayasan, orang tua santri, infaq, shadaqah, zakat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Sedangkan

pengeluaran dana digunakan untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari dana yang diterima. Proses *accounting* pada madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar, dapat diketahui melalui enam indikator, yaitu: (a) APBM disosialisasikan kepada warga madrasah, (b) pelaksanaan APBM sesuai dengan yang direncanakan, (c) ada buku kontrol pemasukan, (d) ada buku kas/pembukuan keuangan, (e) SPJ dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan (f) ada berita acara pemeriksaan administrasi keuangan.

4. Pengawasan pembiayaan madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar secara internal dilakukan oleh yayasan, pimpinan pesantren, majlis guru, kepala madrasah dan komite madrasah. Pengawasan dilakukan dengan cara mengecek setiap 3 bulan sekali kepada bendahara. Pengawasan pembiayaan yang sumber anggaran dari pemerintah maka pengawasan dilakukan oleh pihak eksternal seperti BPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dari Jakarta dan sangat tergantung dengan sumber dana yang digunakan oleh madrasah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, maka ada beberapa rekomendasi kepada madrasah aliyah Teungku Chiek Oemar Diyan dan Al Manar, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dan para peneliti sebagai bahan penelitian selanjutnya.

1. Membangun madrasah bermutu yang berada di pondok pesantren merupakan tanggungjawab bersama antara penyelenggara pendidikan madrasah (pesantren), pemerintah dan masyarakat. Berbeda dengan sekolah negeri pada umumnya yang relatif lebih banyak memiliki kesempatan untuk menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, maka madrasah yang

berada di pondok pesantren justru sebaliknya. Kondisi inilah yang mestinya mendorong madrasah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat dalam bentuk zakat, infak, sadakah dan wakaf. Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat harus mampu dipraktekkan oleh pihak madrasah dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas internal-eksternal dan akuntabilitas dunia-akhirat. Dengan demikian akan mendorong partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Partisipasi masyarakat kepada madrasah dalam bentuk zakat, infak, sadakah dan wakaf bila dikelola dengan manajemen baik akan mampu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

2. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dapat membuat regulasi atau kebijakan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu madrasah yang ada di pondok pesantren melalui manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada madrasah dalam bentuk zakat, infak, sadakah dan wakaf, maka pesantren dapat membentuk badan Baitul Mal pesantren.
3. Bagi peneliti lain juga dapat mengkaji dan memperluas kajian dengan menambah sub fokus lain atau variabel lain sehingga dapat menjelaskan informasi baru dalam perspektif yang berbeda berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan madrasah berbasis masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi bagi peneliti dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan sejenis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Akdon. *Strategic Management for Educational Management*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Angwarmase, R. *Perencanaan Anggaran Pendidikan*, Bandung: Yrama Widya, 2020.
- Arsyad, Azhar. *Pokok-pokok Manajemen; pengetahuan praktis bagi Pimpinan dan Eksekutif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Asfila. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah". *Jurnal Administrasi Pendidikan Unsyiah*. Vol. 3 no. 4 (2015). tersedia pada <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2598> (2015).
- Creswell, John. *Riset Pendidikan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Engkoswara. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fahrurozi, (2012). 'Manajemen Keuangan Madrasah', *Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, XXVII, 232.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- , *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- , *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- , *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Idochi, M. Anwar. *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- K., Yin Robert. *Qualitative Research*. New York: The Guilford Press, 2010.
- Maimun, A. dan Agus Zainun F. *Madrasah Unggulan*. Malang: UIN Maliki

- Press. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhsin, Yeti Heryati dan Mumuh. *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mulyasa. *Kurikulum yang Disempurnakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Rusdiana, A dan Wardjila, *Manajemen Keuangan Sekolah*, Bandung: Arsad Press, 2013.
- Ruslan, Undang, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.
- S, Jaja Jahari dan Amirullah. *Manajemen Madrasah, Teori, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Safriadi. "Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah". *Intektualita*. Vol. 4 no. 2 (2017). tersedia pada <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/4140/2698> (2017).
- Sitompol, Natsir Armaya Siregar dan Mohd Saleh. *Reposisi dan Revitalisasi Madrasah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Afabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Afabeta, 2018.
- Suhardan, Dadang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Supriadi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Tarmizi. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah Pada Min Cempala Kuneng Kabupaten Pidie". *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 3 no. 4 (2015). tersedia pada <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2595/2449> (2015).
- Tenbrunsel, Ann E. "New Ideas for Ethics Research: Thoughts from Accounting, Finance, Management, and Marketing". *Journal of Business Ethics*. Vol. 2 (2009). <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9902-1>.
- Yango, M.D. "Institutional Mechanism for Promoting Accountability in the Philippines Civil Service", *Jurnal Asian Review of Public Administration*. Vol. 3 no. 2 (1991).
- Yazid, Abu. *Paradigma Baru Pesantren*. Yogyakarta: IrciSod, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
- SK Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama nomor E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98, tertanggal 20 Februari 1998, tentang pengembangan Madrasah Aliyah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model pada 26 propinsi yang tersebar di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- <https://www.oemardiyan.com/9-santri-dayah-oemar-diyani-indrapurilulus-snmptn-ke-usk-6-dapat-undangan-ke-uin-ini-nama-namanya>. diakses tanggal 03 Oktober 2021.
- <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/03/hebat-tiga-santri-aceh-lulus-seleksi-pbsb-nasional>. diakses tanggal 05 Oktober 2021.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Safriadi, M.Pd
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor_Mata Kuliah Manajemen Pendidikan
4.	NIP	198010052010031001
5.	NIDN	2005108001
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200510800108000
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Aceh Besar, 05 Oktober 1980
8.	E-mail	safriadi@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081360004172
10.	Alamat Kantor	Jl. Ar-raniry No. 01 Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
13.	Program Studi	Manajemen Pendidikan Islam
14.	Fakultas	FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh

B. Riwayat Pendidikan

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1994	SD/MI	MIN 1 Indrapuri Aceh Besar	-
1997	SMP/MTs	MTsN 1 Medan Sumatra Utara	-
2000	SMA/MA	MA Ulumul Qur'an Kota Langsa	IPA
2005	Sarjana (S-1)	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Pendidikan Bahasa Arab
2009	Pascasarjana (S-2)	Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	Manajemen Pendidikan
2021	Pascasarjana (S-3)	Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Manajemen Pendidikan Islam

C. Pengalaman Penelitian Dalam 3 Tahun Terakhir

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2019	Transformasi Budaya Melayu dalam Budaya Sekolah di Provinsi Aceh dan Riau	Peneliti	DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2020	Manajemen Konflik Perguruan Tinggi Islam di Indonesia	Peneliti	DIPA UIN Raden Intan Lampung

2022	Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Implementatif Pada Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar)	Peneliti	DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh
------	---	----------	-------------------------------

D. Publikasi Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2022	Analisis SWOT Formulasi Strategi Pengembangan Dosen di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Nama Jurnal : Intelektualita Terbitan : Vol XI No.01 Tahun Terbit : Juni 2022 Halaman : 33-43
2021	Implementation of Conflict Management in Improving the Performance of Private Islamic Religious Universities in Lampung	Jurnal Ri'ayah IAIN Metro
2021	Pro-Social Behavior on Sme Resilience: Sme's Leadership in Overcoming Covid 19 Crisis	Ilkogretim Online - Elementary Education Online
2021	Integration Of the Pesantren Curriculum Kutub Turats In Formal Educational Institutions	Journal Psychology and Education
2020	Identifying Strategic Plans for Lecturer Development at Ar-Raniry State Islamic University Banda Aceh, Indonesia	IIUM Journal of Educational Studies
2020	Internal and External Analysis of Lecturer Development Formulation Strategy at Ar-Raniry State Islamic University, Banda Aceh - Indonesia	International Proceeding ICETLAWBE
2019	Development of State Islamic University as A World Class Center of Islamic Studies	International Proceeding Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press
2019	Transformative Leadership Model for Improving the Quality of Indonesian Islamic Universities	International Proceeding Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press
2019	Madrasah Financing Management Community Based	International Proceeding on Islamic Educationan Management. UIN Sumut
2016	Pengembangan Perguruan Tinggi Islam Negeri Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	Nama Jurnal : Intelektualita Terbitan : Vol IV No.1 Tahun Terbit : Juni 2016 Halaman : 24-46
2017	Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah	Nama Jurnal : Intelektualita Terbitan : Vol VI No.2 Tahun Terbit : Desember 2016
2017	Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran Ekspositori.	Nama Jurnal : Mudarrisuna Terbitan : Vol VII No.1 Tahun Terbit : Juni 2017 Halaman : 149-164

E. Publikasi Ilmiah Dalam Buku 5 Tahun Terakhir

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020	Metodologi Penelitian	Nama jurnal : Ideas Publishing Tahun terbit : Januari 2020 Jumlah Halaman : 475
2019	Dosen dan literasi publikasi	Penerbit : Ideas Publishing Tahun Terbit : Mei 2019 Jumlah Halaman : 230
2019	Manajemen Sumber Daya Manusia	Penerbit : Ideas Publishing Tahun Terbit : Desember 2019 Jumlah Halaman : 452
2018	Manajemen Perubahan di Era Disruption	Penerbit : Ideas Publishing Tahun Terbit : Desember 2018 Jumlah Halaman : 359

F. Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 3 Tahun Terakhir

Tahun	Kegiatan
2018	Tim Safari Ramadhan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh
2019	Khatib Jumat Masjid Baitul Maqdis Kecamatan Indrapuri Aceh Besar
2020	Khatib Jumat Masjid Al Ukhwah Kedaton Kota Bandar Lampung

G. Organisasi Profesi/Ilmiah

Tahun	Organisasi	Jabatan
2018 - sekarang	Ahli dan Dosen Republik Indonesia	Anggota
2018 - sekarang	Persatuan Manajer Pendidikan Indonesia (PERMA PENDIS)	Anggota

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Banda Aceh, 17 September 2022



Dr. Safriadi, M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Syekh Abdur Rauf, No. 1 Gedung Museum Lt. 1, Kopelma Darussalam Banda Aceh, 23111

Telp.: 0651-7552921, Fax. 0651-7551857

Email: lp2m@ar-raniry.ac.id; Situs: http://lp2m.uin.ar-raniry.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 259/Un.08/LP2M/Kp.01.2/05/2022

- Menimbang
- bahwa dalam rangka kegiatan Penelitian Dasar Program Studi, maka perlu adanya penugasan untuk kegiatan tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, nama tercantum dalam surat tugas, mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;
- Dasar
- Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - PMK Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas
 - DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP DIPA 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 Nopember 2021

Memberi Tugas

Kepada :

- Nama : Dr. Safriadi, M.Pd
NIP : 198010052010031001
Pangkat/Golongan : Penata/ (III/c)

Tujuan : Aceh / Aceh Besar / Pesantren Chik Oemar Diyan dan Pesantren Al Manar, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022

Untuk : Kegiatan Penelitian dengan Judul "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Implementatif pada Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar)"

Selesai melaksanakan tugas segera menyampaikan laporan kepada pemberi tugas sesuai ketentuan.



Tembusan :

- Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Kabag. Organisasi dan Kepegawaian UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



Lampiran I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/PMK.05/2012
TENTANG
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

Lembar ke :
Kode No :
Nomor : 260/Un.08/LP2M/Kp.01.2/05/2022

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
2.	Nama / NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Dr. Safridi, M.Pd 198010052010031001	
3.	a. Pangkat dan Golongan	a. Penata/ (III/c)	
	b. Jabatan / Instansi	b. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c. =C =	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Implementatif pada Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar)	
5.	Alat angkutan yang digunakan	Udara	
6.	a. Tempat berangkat	a. Kota Banda Aceh	
	b. Tempat tujuan	b. Aceh / Aceh Besar / Pesantren Chik Oemar Diyan dan Pesantren AI Manar	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a. 01 (Satu) Hari	
	b. Tanggal berangkat	b. 24 May 2022	
	c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *)	c. 24 May 2022	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. Syafruddin, S.Ag., M.Ag		Anggota Peneliti
	2. - 3. -		-
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	DIPA UIN Ar - Raniry Banda Aceh SBK Sub Keluaran Penelitian	
10.	Keterangan lain-lain		

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Banda Aceh
Tanggal : 11 Mei 2022
Pejabat Pembuat Komitmen

YASHIER ARAFHAT ZA, S.H.I



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	<p>I. Berangkat dari : Kota Banda Aceh (tempat kedudukan) Ke : Aceh / Aceh Besar / Pesantren Chik Oemar Diyan dan Pesantren Al Manar</p> <p>Pada Tanggal : 24 Mei 2022</p> <p>an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Kapsipen</p>  <p>Dr. Anton Widayanto NIP. 197610092002121002</p>
<p>II. Tiba di : MAS AL MANAR Pada tanggal : 24 MEI 2022 Kepala : MAS AL MANAR</p>  <p>PUTRAYADI, S.Pd</p>	<p>Berangkat dari : MAS AL MANAR Ke : KE BANDA ACEH Pada tanggal : 24 MEI 2022 Kepala : MAS AL MANAR</p>  <p>PUTRAYADI, S.Pd</p>
<p>III. Tiba di : Pesantren Chik Oemar Diyan Pada tanggal : 24 MEI 2022 Kepala : MAS AL MANAR</p>  <p>PUTRAYADI, S.Pd NIP. 197610092002121001</p>	<p>Berangkat dari : Pesantren Chik Oemar Diyan Ke : Pesantren Chik Oemar Diyan Pada tanggal : 24 MEI 2022 Kepala : MAS AL MANAR</p>  <p>PUTRAYADI, S.Pd NIP. 197610092002121001</p>
<p>IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :</p>
<p>V. Tiba kembali di : Banda Aceh (tempat kedudukan) Pada Tanggal : 24 Mei 2022</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>YASHIER ARAFHAT ZA, S.H.I</p>	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p>YASHIER ARAFHAT ZA, S.H.I</p>
<p>VI. Catatan lain-lain</p>	
<p>VII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.</p>	



KEMENTERIAN AGAMA

MADRASAH ALIYAH TGK. CHIEK OEMAR DIYAN

Krueng Lamkarcung – Indrapuri – Aceh Besar Tlp 0822-7341-2229 e-mail : mas.oemardiyan@gmail.com

NSM : 1312 11 06 0005

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No. : B-230/Ma.01.44/07/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jawahir, S.Pd.I
NIP : 19730524 200710 1 001
Jabatan : Kepala Madrasah
Pada : MAS Tgk. Chiek Oemar Diyan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

Nama : Dr. Safriadi, M.Pd
NIP : 198010052010031001
Pangkat/ Gol : Penata/ (III/c)
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul Penelitian : Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat
(Studi Implementatif pada Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar)

Sehubungan dengan adanya surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan Nomor : 258/Un.08/LP2M/TL.03/05/2022 pada tanggal 11 Mei 2022. Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami jelaskan bahwa nama tersebut telah selesai melakukan Penelitian di MAS Tgk. Chiek Oemar Diyan dengan Judul Penelitian "**Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Implementatif pada Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar)**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Indrapuri, 26 Juli 2022
Kepala MAS Tgk. Chiek Oemar Diyan

Jawahir, S. Pd.I

Nip. 19730524 200710 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-MANAR**

KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA

NSM : 131211060009 | NPSN : 10114252

Jln. Blang Bintang Lama | Gampong Lampermai | KodePos : 23371

| Email : masalmanar2004@gmail.com

ACEH BESAR

Nomor : Ma.01.048/008/VII/2022
Lamp. : -
Hal : **Telah Melakukan Penelitian**

Aceh Besar, 25 Juli 2022

KepadaYth,

**Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh**

Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Nomor : 258/Un.08/LP2M/TL.03/05/2022 tanggal 11 Mei 2022, perihal Izin Melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut :

Nama : **Dr. Safriadi, M.Pd**
NIP : 198010052010031001
Prodi / Jurusan : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Benar yang namanya tersebut diatas telah Melakukan Penelitian/Mengumpulkan Data yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi persyaratan bahan penulisan Skripsi dengan judul :

" Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Implementatif pada Pondok Pesantren di Kabupaten Aceh Besar) ".

Demikianlah surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Kepala Madrasah,

Putrayadi, S. Pd



